



**LAPORAN AKTUALISASI
PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
ANGKATAN 1 TAHUN 2018**

**Penerjemahan Berita-Berita terkait Kegiatan Badan Kerja Sama
Antar-Parlemen (BKSAP) di Situs www.dpr.go.id**

Oleh:

NURUL MUTTAQIN, S.S.

NIP. 198608062018021001

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

2018

LEMBAR PENGESAHAN

PESERTA PELATIHAN DASAR CPNS GOLONGAN III SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI ANGKATAN I TAHUN 2018

Nama : Nurul Muttaqin, S.S.
NIP : 198608062018021001
Jabatan : Calon Penerjemah Ahli Pertama
Instansi : Setjen dan BK DPR RI

Jakarta, September 2018

Mengetahui,
Coach



Dr. Ujianto Singgih P., M.Si.
NIP. 196411191990031003

Menyetujui,
Mentor



Fusrudin Arief Budiman, S.S., M.Si.
NIP. 197011051997031007

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat yang telah diberikan sehingga penyusunan laporan aktualisasi ini dapat selesai tepat waktu. Laporan ini memuat rumusan isu, rancangan kegiatan, dan aktualisasi kegiatan di Bagian Administrasi Kegiatan Luar Negeri Anggota (Minluna), Biro Kerja Sama Antar-Parlemen, Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Selesainya seluruh kegiatan ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, arahan, masukan, dan kerja sama berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Rahaju Setya Wardani, S.H., M.M. selaku Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan
2. Ibu Endah Tjahjani Dwirini R., S.S., M.Phil. selaku Kepala Biro Kerja Sama Antar-Parlemen
3. Bapak Sartomo, S.S., M.Si. selaku Kepala Bagian Administrasi Kegiatan Luar Negeri Anggota
4. Ibu Elvira Dianti A., S.S., M.Si. selaku Kepala Subbagian Alih Bahasa
5. Bapak DR. Ujianto Singgih P., M.Si. selaku selaku *coach*
6. Bapak Fasrudin Arief Budiman, S.S., M.Si. selaku mentor
7. Teman-teman CPNS Setjen dan BK DPR RI, serta rekan-rekan penerjemah dan staf di Bagian Minluna.

Penyusun menyadari laporan ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan.

Jakarta, 25 September 2018

Nurul Muttaqin, S.S.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAGIAN I: TUGAS POKOK DAN FUNGSI	1
A. Organisasi/Unit Kerja.....	1
B. Struktur Organisasi Biro Kerja Sama Antar-Parlemen	2
C. Jabatan Peserta.....	2
BAGIAN II: DESKRIPSI ISU	3
A. Isu Ke-1	3
B. Isu Ke-2.....	3
C. Isu Ke-3.....	4
D. Matriks Pemilihan Isu	5
BAGIAN III: RANCANGAN AKTUALISASI.....	6
A. Matriks Rancangan Aktualisasi	7
B. Jadwal Kegiatan Aktualisasi	13
BAGIAN IV: PELAKSANAAN AKTUALISASI	16
A. Penjelasan Perubahan	16
B. Capaian Pelaksanaan Aktualisasi	17
BAGIAN V: PENUTUP	29
A. Kesimpulan	29
B. Saran	30
LAMPIRAN	

BAGIAN I

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

A. Organisasi/Unit Kerja

Berdasarkan Pasal 197 Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen dan BK DPR RI), disebutkan bahwa Bagian Administrasi Kegiatan Luar Negeri Anggota (Minluna) mempunyai tugas penyelenggaraan dukungan administrasi dalam pelaksanaan kegiatan luar negeri Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) serta penyelenggaraan dukungan alih bahasa. Bagian Minluna berada di bawah Biro Kerja Sama Antar-Parlemen (Biro KSAP).

Dalam melaksanakan tugas di atas, Bagian Minluna menyelenggarakan fungsi (Pasal 198):

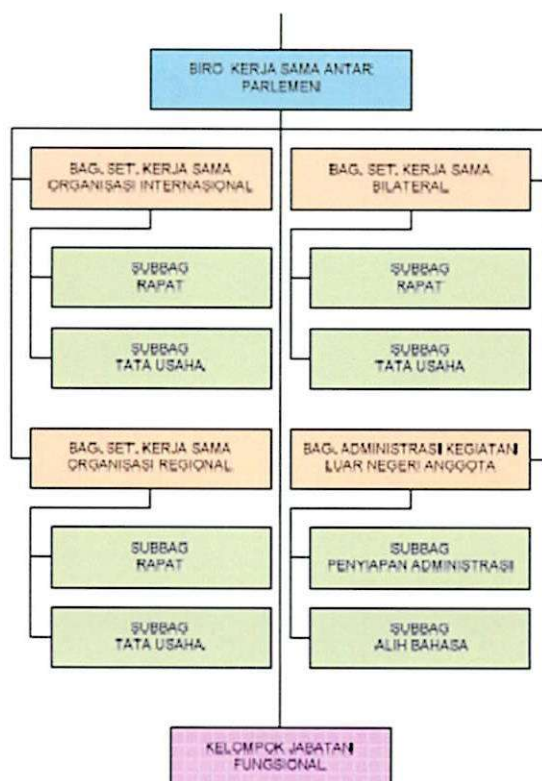
1. Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Minluna;
2. Penyusunan bahan kegiatan di bidang kegiatan luar negeri Anggota DPR RI;
3. Pelaksanaan di bidang kegiatan luar negeri Anggota DPR RI;
4. Pelaksanaan penyiapan bahan/materi dan pelayanan rapat dalam rangka pelaksanaan kegiatan luar negeri Anggota DPR RI;
5. Pelaksanaan dukungan alih bahasa;
6. Pelaksanaan tata usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan luar negeri Anggota DPR RI;
7. Pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro KSAP; dan
8. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Minluna kepada Kepala Biro KSAP.

Bagian Minluna terdiri atas:

1. Subbagian Penyiapan Administrasi. Subbagian ini mempunyai tugas melakukan dukungan penyiapan bahan/materi, pelayanan rapat, dan tata usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan luar negeri Anggota DPR RI.
2. Subbagian Alih Bahasa. Subbagian ini mempunyai tugas melakukan dukungan alih bahasa.

Peserta menjabat sebagai Penerjemah Ahli Pertama yang ditempatkan di Bagian Minluna dengan atasan langsung Kepala Subbagian Alih Bahasa.

B. Struktur Organisasi Biro Kerja Sama Antar-Parlemen



C. Jabatan Peserta

. Berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang telah dibuat, peserta memiliki tugas:

1. Melakukan penerjemahan, penyuntingan, dan penyeliaan naskah bahan informasi publik;
2. Melakukan penerjemahan, penyuntingan, dan penyeliaan naskah hukum;
3. Melakukan penerjemahan, penyuntingan, dan penyeliaan naskah biografi;
4. Melakukan penerjemahan lisan parainterpreting.

BAGIAN II DESKRIPSI ISU

A. ISU KE-1

Kurang optimalnya sarana dan prasarana pendukung bagi penerjemah untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja.

Komputer dan printer adalah sarana yang sangat vital bagi penerjemah. Beberapa komputer penerjemah berjalan lambat dan printer tidak bisa digunakan. Tiga penerjemah baru, misalnya, mendapat komputer yang spesifikasinya sudah lama. Pun beberapa penerjemah senior yang kadang komputer mereka sering mengalami gangguan. Hal demikian cukup mengganggu kinerja terutama ketika ada tugas yang harus diselesaikan segera.

Akibatnya, penerjemah kadang tidak bisa menyelesaikan tugas tepat waktu. Dokumen yang seharusnya diselesaikan hari ini, baru selesai keesokan harinya. Hal ini tentunya menghambat penerjemah dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada anggota DPR RI ataupun pelayanan kepada rekan pegawai di bagian lain (**Komitmen Mutu-Pelayanan Publik**).

B. ISU KE-2

Masih kurangnya berita-berita berbahasa Inggris di situs dpr.go.id tentang kegiatan anggota dewan saat menerima delegasi dari negara lain.

Sejauh pengamatan penulis, belum ada menu berita berbahasa Inggris di situs dpr.go.id. Berita-berita mengenai kegiatan dewan, terutama saat mereka menerima kunjungan delegasi dari negara lain, tidak bisa ditemukan di situs tersebut. Berita-berita sebagian besar hanya tersedia dalam bahasa Indonesia.



Situs dpr.go.id versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.



Situs Kongres Nasional Rakyat Tiongkok (DPR) versi Mandarin dan bahasa Inggris.

Hal ini tentu menyulitkan parlemen atau delegasi dari negara lain untuk mengetahui kegiatan di Indonesia atau kegiatan yang mereka sudah lakukan dengan anggota DPR RI. Padahal, tantangan global telah menarik parlemen untuk aktif berpartisipasi dalam kancah hubungan internasional. Dalam UU MD3 juga disebutkan tentang diplomasi parlemen, yang mengamanatkan DPR RI sebagai lembaga negara untuk membina, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPR dan parlemen negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral, termasuk organisasi internasional yang menghimpun parlemen dan/atau anggota parlemen negara lain. Upaya-upaya tersebut salah satunya bisa dipenuhi melalui pemberitaan kegiatan-kegiatan parlemen dalam bahasa Inggris. Untuk itu, dibutuhkan integritas menyeluruh dari beberapa bagian (**Whole of Government/WoG**) guna menghadirkan layanan berita dalam bahasa Inggris yang memiliki kualitas baik (**Komitmen Mutu**).

C. ISU KE-3

Belum adanya standarisasi istilah-istilah penerjemahan di lingkungan DPR RI.

Masih ditemukan ketidakkonsistenan penerjemahan di kalangan penerjemah internal DPR RI maupun penerjemah eksternal. Hal ini bisa dilihat dari produk-produk penerjemahan baik berupa pidato maupun undang-undang yang tidak memiliki kekonsistenan satu dengan yang lain. Di kalangan penerjemah internal, hal ini sudah diatasi dengan membuat panduan penerjemahan istilah. Namun, karena sifat bahasa yang dinamis dan

menyesuaikan zaman, beberapa istilah baru perlu disesuaikan lagi. Jika tidak diselesaikan, hal ini akan menimbulkan misinterpretasi dari tamu ataupun delegasi parlemen dari negara lain.

D. Matriks Pemilihan Isu Prioritas dengan Analisis USG

No	Isu	Kriteria			JumlahNilai
		U	S	G	
1	Kurang optimalnya sarana dan prasarana pendukung bagi penerjemah untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja.	3	3	2	8
2	Masih kurangnya berita-berita berbahasa Inggris di situs dpr.go.id tentang kegiatan Anggota Dewan saat menerima delegasi dari negara lain.	5	4	4	13
3	Belum adanya standardisasi istilah-istilah penerjemahan di lingkungan DPR RI.	3	3	3	9

Berdasarkan Analisis USG tersebut, isu yang dipilih adalah isu kedua dengan rumusan: **Masih kurangnya berita-berita berbahasa Inggris di situs dpr.go.id tentang kegiatan Anggota Dewan saat menerima delegasi dari negara lain.**

BAB III

RANCANGAN AKTUALISASI

- Unit Kerja** : Bagian Administrasi Kegiatan Luar Negeri Anggota (Minluna)
- Identifikasi Isu** : 1) Belum adanya menu berita berbahasa Inggris di situs dpr.go.id
2) Berita mengenai kegiatan Anggota Dewan saat menerima delegasi dari negara lain tidak bisa diketahui oleh parlemen atau delegasi yang bersangkutan
3) Isu ini terkait dengan Komitmen Mutu dan Whole of Government (WoG).
- Isu yang Diangkat** : Masih kurangnya berita-berita berbahasa Inggris di situs dpr.go.id tentang kegiatan Anggota Dewan saat menerima delegasi negara lain.
- Gagasan Pemecahan Isu** : ➤ Berkoordinasi dengan atasan di Bagian Minluna
➤ Berkoordinasi dengan Biro Pemberitaan Parlemen
➤ Pendistribusian berita-berita yang akan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris
➤ Berkoordinasi dengan Bidang Data dan Teknologi Informasi (BDTI)
➤ Penyusunan pakem penulisan berita dalam bahasa Inggris

A. Matriks Rancangan Aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Tusi/Tujuan Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Berkoordinasi dengan atasan di Bagian Minluna	✓ Konsultasi dengan atasan tentang rencana pembuatan penerjemahan berita berbahasa Inggris ✓ Meminta surat penugasan/perintah kepada atasan ✓ Meminta jadwal kegiatan anggota menerima delegasi dari luar negeri ✓ Melaporkan hasil kepada atasan	✓ Catatan kegiatan dan foto dokumentasi ✓ Surat tugas ✓ Jadwal kunjungan ✓ Catatan kegiatan, print screen pemuatan berita	Mengawali kegiatan ini saya akan melakukan konsultasi dengan atasan dengan memperhatikan etika dan sopan santun (Etika Publik). Selanjutnya saya akan meminta dibuatkan surat tugas untuk melaksanakan kegiatan penerjemahan berita (Akuntabilitas). Begitupula, untuk mempermudah pemantauan jadwal kunjungan delegasi ke DPR RI saya akan meminta jadwal kunjungan ke bagian administrasi (Akuntabilitas). Seluruh perkembangan mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga hasil terjemahan dimuat di situs dpr.go.id akan saya laporkan ke atasan (Komitmen Mutu-Akuntabilitas).	Koordinasi yang baik dengan atasan di Bagian Minluna akan mendukung fungsi Setjen dan BK DPR RI dalam koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Setjen dan BK DPR.	Dengan memahami dasar pelaksanaan koordinasi yang baik dengan atasan, maka nilai-nilai organisasi Setjen dan BK DPR RI yaitu profesional dan akuntabel akan semakin kuat.
2.	Berkoordinasi	✓ Melakukan	✓ Foto	Saya akan melakukan	Dengan melakukan	Dengan memahami

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Tusi/Tujuan Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	dengan Biro Pemberitaan Parlemen	pendekatan dengan pejabat terkait ✓ Meminta jadwal peliputan kegiatan Anggota Dewan menerima delegasi dari luar negeri ✓ Meminta naskah berita yang akan diterjemahkan ✓ Meminta bahan-bahan pendukung berita seperti foto dan video ✓ Menyerahkan teks yang sudah diterjemahkan	✓ Jadwal peliputan ✓ Naskah berita ✓ File foto atau video ✓ Hasil naskah berita yang sudah diedit	pendekatan dengan pejabat dari Biro Pemberitaan Parlemen terlebih dahulu dengan mengutamakan etika dan sopan santun, baik itu melalui tatap muka langsung ataupun melalui media komunikasi lain (Whole of Government-Etika Publik). Setelah maksud dan tujuan saya bisa dipahami, saya akan meminta jadwal peliputan kegiatan anggota saat menerima delegasi dari negara lain. Hal itu akan saya jadikan acuan dalam menyusun jadwal penerjemahan bagi para penerjemah (Akuntabilitas). Kemudian, saya akan meminta berita-berita yang akan diterjemahkan untuk kemudian didistribusikan ke penerjemah. Selain itu, sebisa mungkin saya mendapatkan bahan-bahan pendukung seperti video	koordinasi yang baik bersama biro lain, hal itu akan mendukung fungsi Setjen dan BK DPR RI dalam koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas, dan pelayanan informasi di lingkungan Setjen dan BK DPR	dasar-dasar koordinasi yang baik dengan bagian lain, maka nilai-nilai organisasi Setjen dan BK DPR RI yaitu akuntabel dan integritas akan semakin diperkuat.

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Tusi/Tujuan Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
				atau video. Saat meminta, saya akan melakukan pendekatan yang kreatif sehingga tidak terkesasn memaksa (Etika Publik). Sebagai bentuk pertanggungjawaban, hasil terjemahan itu akan saya sampaikan kepada Biro Pemberitaan Parlemen untuk disimpan sebagai arsip, baik dalam bentuk hard copy maupun soft copy (Akuntabilitas-Whole of Government).		
3.	Pendistribusianberita-berita yang akan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris	✓ Menginventarisasi berita-berita kegiatan anggota dewan yang akan diterjemahkan ✓ Pendistribusian penugasan penerjemahan kepada para penerjemah ✓ Pengeditan hasil terjemahan	✓ Daftar berita yang akan diterjemahkan ✓ Disposisi pembagian tugas ✓ Hasil naskah setelah diedit	Sebelum mendistribusikan naskah berita, saya akan menginventarisasi berita mana saja yang akan diterjemahkan (Akuntabel). Daftar tersebut akan saya serahkan kepada pimpinan untuk kemudian dibagi kepada para penerjemah. Seandainya saat itu saya sedang menyelesaikan tugas lain, maka saya akan menyelesaikan tugas pertama terlebih dahulu	Pendistribusian bahan terjemahan yang merata kepada semua penerjemah akan mendukung tercapainya kualitas penerjemahan yang baik, sehingga fungsi Bagian Minluna di Biro KSAP sebagai pelaksana alih bahasa, penyiapan bahan/materi dan pelayanan rapat dalam rangka kegiatan luar negeri anggota akan	Dengan memahami proses pendistribusian terjemahan secara baik, maka kerja penerjemah bisa terintegrasi dengan baik. Hal ini sesuai dengan nilai profesional dan integritas dalam organisasi Setjen dan BK DPR RI.

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Tusi/Tujuan Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
				baru kemudian tugas kedua. Jika memang pada hari itu saya atau penerjemah lain tidak dimungkinkan menyelesaikan penerjemahan naskah berita, hal itu akan saya sampaikan kepada atasan (Akuntabilitas-Etika Publik). Untuk menghasilkan terjemahan terbaik, saya akan meminta penerjemah senior untuk mengedit hasil terjemahan saya (Komitmen Mutu).	tercapai.	
4.	Berkoordinasi dengan Bidang Data dan Teknologi Informasi (BDTI)	✓ Melakukan pendekatan dengan pejabat terkait ✓ Menyampaikan hasil terjemahan yang akan dimuat di situs ✓ Pengecekan pemuatan berita di situs	✓ Foto ✓ File hasil terjemahan ✓ Print screen penayangan berita	Saya akan melakukan pendekatan dengan pejabat di Bidang Data dan Teknologi Informasi dengan etika dan sopan santun (Etika Publik). Hal itu sebagai pintu masuk sebelum saya menyampaikan maksud untuk dimuatkan berita yang sudah diterjemahkan oleh Biro KSAP (Whole of Government). Setelah	Kualitas pelaksanaan koordinasi yang baik akan mendukung tercapainya fungsi Setjen dan BK DPR RI dalam koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas, serta pelayanan informasi, dan fungsi Minluna dalam menyusun rencana kegiatan dan anggaran.	Dengan memahami pentingnya koordinasi dengan bidang lain, maka nilai-nilai organisasi Setjen dan BK DPR RI seperti profesional dan akuntabilitas akan terwujud.

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Tusi/Tujuan Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
				materi disampaikan, saya akan mengecek di situs <i>dpr.go.id</i> apakah berita tersebut sudah dimuat atau belum. Seandainya berita belum dimuat, saya akan mengomunikasikan dengan BDTI dengan etika dan sopan santun (Komitmen Mutu-Etika Publik).		
5.	Penyusunan buku pakem penulisan berita dalam bahasa Inggris	✓ Mengumpulkan referensi penulisan berita dalam bahasa Inggris ✓ Mempelajari pakem penulisan dari situs-situs berita luar negeri ✓ Mendiskusikan pakem penulisan itu kepada para penerjemah untuk ditindaklanjuti	✓ Buku ✓ Print screencontoh-contoh berita situs-situs berita luar negeri ✓ Foto kegiatan	Mengawali penyusunan pakem penulisan berita dalam bahasa Inggris, saya akan mengumpulkan referensi dari berbagai sumber, seperti buku dan makalah di internet, karena pakem penerjemahan biasa dengan penulisan berita sedikit berbeda (Komitmen Mutu). Selain itu, saya akan melihat model penulisan berita dari berbagai kantor berita luar negeri (Komitmen Mutu). Seandainya situs-situs berita tersebut susah diakses karena berbayar, saya akan mencari referensi	Kualitas penulisan berita yang bagus sehingga bisa dinikmati masyarakat internasional tentunya akan mendukung pencapaian tugas dan fungsi Biro KSAP dalam hal dukungan kesekretariatan Kerja Sama AntarParlemen dan layanan alih bahasa.	Dengan menyadari pentingnya kualitas penerjemahan yang baik dan sesuai pakem yang ada, hal itu turut mendukung terwujudnya nilai profesional dalam organisasi Setjen dan BK DPR RI.

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Tusi/Tujuan Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
				lain dari koran lokal seperti The Jakarta Post (Komitmen Mutu). Setelah semuanya terangkum, saya akan mencoba mendiskusikannya dengan rekan penerjemah yang lain dengan mempertimbangkan waktu dan kesibukan mereka (Etika Publik).		

B. Jadwal Kegiatan Aktualisasi

Matriks Jadwal Rencana Kegiatan Aktualisasi

No	Kegiatan/ Tahapan Kegiatan	MEI				JUNI				JULI				AGUSTUS				SEPTEMBER			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1.	Berkoordinasi dengan atasan di Bagian Administrasi Kegiatan Luar Negeri Anggota																				
	a) Konsultasi dengan atasan tentang rencana pembuatan penerjemahan berita berbahasa Inggris																				
	b) Meminta surat penugasan/perintah kepada atasan																				
	c) Meminta jadwal kegiatan anggota menerima delegasi dari luar negeri																				
	d) Melaporkan hasil kepada atasan																				
2.	Berkoordinasi dengan Biro Pemberitaan Parlemen																				
	a) Melakukan pendekatan dengan pejabat terkait																				
	b) Meminta jadwal peliputan kegiatan anggota dewan menerima delegasi dari luar negeri																				
	c) Meminta naskah berita																				

No	Kegiatan/ Tahapan Kegiatan	MEI				JUNI				JULI				AGUSTUS				SEPTEMBER			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
3.	yang akan diterjemahkan																				
	(d) Meminta bahan-bahan pendukung berita seperti foto dan video																				
	(e) Menyebarkan teks yang sudah diterjemahkan																				
	Pendistribusian berita- berita yang akan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris																				
	a) Menginventarisasi berita-berita kegiatan anggota dewan yang akan diterjemahkan																				
	b) Pendistribusian penugasan penerjemahan kepada para penerjemah																				
	c) Pengeditan hasil terjemahan																				
	Berkoordinasi dengan Bidang Data dan Teknologi Informasi (BDTI)																				
4.	a) Melakukan pendekatan dengan pejabat terkait																				
	b) Menyampaikan hasil terjemahan yang akan dimuat di situs																				
	c) Pengecekan pemuatan																				

No	Kegiatan/ Tahapan Kegiatan	MEI				JUNI				JULI				AGUSTUS				SEPTEMBER			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
	berita di situs																				
5.	Penyusunan pakem penulisan berita dalam bahasa Inggris																				
	a) Mengumpulkan referensi penulisan berita dalam bahasa Inggris																				
	b) Mempelajari pakem penulisan dari situs-situs berita luar negeri																				
	c) Mendiskusikan pakem penulisan itu kepada para penerjemah untuk ditindaklanjuti																				

Keterangan:



: Jadwal Rancangan Kegiatan



: Realisasi Pelaksanaan



: Pelaksanaan Sesuai dengan Jadwal Rancangan

BAGIAN IV

PELAKSANAAN AKTUALISASI

A. Penjelasan Perubahan

Terdapat perubahan terkait batasan berita yang diterjemahkan. Jika semula yang akan diterjemahkan hanyalah berita-berita yang terkait dengan kegiatan Anggota Dewan saat menerima kunjungan delegasi parlemen negara lain yang menjadi tamu DPR, kini yang diterjemahkan adalah berita-berita yang terkait dengan kegiatan Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP). Hal itu dilakukan agar penerjemahan lebih jelas dan tidak terlalu sempit.

Perubahan ini sebenarnya dilakukan atas arahan pimpinan dan penerjemah senior di Bagian Minluna. Beberapa kali pimpinan menekankan pentingnya peran BKSAP sebagai alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. Selain menerima kunjungan parlemen negara lain, BKSAP juga memiliki tugas mengembangkan, membina, dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPR dan parlemen negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral. termasuk organisasi internasional yang menghimpun parlemen dan/atau anggota parlemen negara lain. Dengan demikian, berita yang diterjemahkan nantinya tidak melulu mengenai penerimaan kunjungan delegasi parlemen negara lain, tetapi juga upaya-upaya DPR untuk meningkatkan hubungan persahabatan dengan parlemen negara lain.

Di samping perubahan batasan berita, juga dilakukan sedikit penyesuaian urutan pelaksanaan kegiatan. Menurut rencana awal, kegiatan akan diawali dengan koordinasi dengan pimpinan di Bagian Minluna, kemudian berkoordinasi dengan Biro Pemberitaan Parlemen, mendistribusikan berita, koordinasi dengan Bidang Data dan Teknologi Informasi (BDTI), dan diakhiri dengan penyusunan buku pakem penulisan berita dalam bahasa Inggris. Perubahan yang dilakukan adalah menggeser kegiatan kedua menjadi kegiatan keempat, yakni mengganti kegiatan koordinasi dengan Biro Pemberitaan Parlemen dengan koordinasi dengan BDTI. Hal itu dilakukan karena pada hari-hari pertama aktualisasi, Bagian Minluna menggelar rapat dengan BDTI yang membahas proyek perubahan yang dijalankan Kepala Bagian Minluna, Bapak Sartomo. Dalam rapat tersebutlah, penulis turut menyampaikan program aktualisasi Latsar CPNS dan meminta bantuan agar dibuatkan menu “News” website www.dpr.go.id untuk menampung berita-berita yang akan diterjemahkan. Selebihnya, tahapan kegiatan dilakukan sesuai rencana.

B. Capaian Pelaksanaan Aktualisasi

1. Berkoordinasi dengan atasan di Bagian Administrasi Kegiatan Luar Negeri Anggota

Kegiatan koordinasi dengan atasan di Bagian Administrasi Kegiatan Luar Negeri Anggota dilakukan pada tanggal 23 Mei 2018 di ruang Kepala Bidang Minluna, yang dihadiri oleh Kepala Bidang Minluna dan Kepala Subbagian Alih Bahasa (laporan dan foto kegiatan bisa dilihat di lampiran). Saat meminta kesediaan pimpinan, penulis memintanya dengan bahasa yang sopan sembari memperhatikan kesibukan pimpinan. Saat itu pimpinan terlihat tidak sedang sibuk sehingga penulis berinisiatif untuk meminta waktu, dan pimpinan bersedia. Dalam hal ini penulis telah menerapkan **Etika Publik**.

Kepada pimpinan, penulis menyampaikan garis besar pelaksanaan Latsar CPNS yang saat itu baru saja selesai. Penulis mengatakan bahwa penulis telah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Latsar dengan penuh kesungguhan. Semua materi pembelajaran seperti bela negara, pembelajaran di dalam kelas maupun luar kelas, penulis ikuti tanpa pernah meninggalkan satu kegiatan pun. Hal ini penulis sampaikan untuk menunjukkan nilai-nilai **Akuntabilitas**.

Kemudian terkait rancangan aktualisasi, penulis menyampaikan isu yang diangkat, yaitu masih kurangnya berita-berita berbahasa Inggris di situs www.dpr.go.id tentang kegiatan Anggota Dewan saat menerima delegasi parlemen negara lain. Pimpinan menyambut baik rencana ini, sembari memberi masukan bahwa “tentang kegiatan Anggota Dewan saat menerima delegasi negara lain” bisa diperluas menjadi “kegiatan yang terkait dengan Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP)”. Hal itu karena salah satu tugas BKSAP juga menerima delegasi parlemen dari negara lain. Dengan hanya menerjemahkan berita terkait BKSAP, pimpinan juga telah memberikan batasan yang jelas tentang jenis berita yang akan diterjemahkan. Di sini, **Komitmen Mutu** sangat diperhatikan karena jika terlalu banyak berita yang diterjemahkan sementara penerjemah di Minluna jumlahnya terbatas, yakni tujuh orang, dikhawatirkan kualitas berita terjemahan tidak maksimal. Oleh karena itu, disepakati bahwa berita-berita yang diterjemahkan hanya yang terkait BKSAP.

Diketahui pula dalam pertemuan tersebut, kegiatan terkait BKSAP ada yang terjadwal dan ada yang tidak. Kegiatan terjadwal misalnya pelaksanaan Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) pada 13-14 Juni 2018 di Jakarta, dan The 2nd World Parliamentary Forum on Sustainable Development pada 12-13 September 2018 di Bali. Dalam perjalanannya, penulis ditugaskan dalam dua kegiatan tersebut sebagai *liaison officer* (LO).

Koordinasi juga penulis lakukan dengan atasan untuk melaporkan perkembangan tiap-tiap tahap. Paling sering penulis ditanyai mengenai jumlah berita yang sudah diterjemahkan dan diunggah. Hal ini merupakan wujud dari penerapan **Akuntabilitas**, meskipun koordinasi yang dilakukan tidak melulu bersifat formal. Terkadang, atasan menanyakan hal tersebut langsung dengan mendatangi meja penulis.

Penulis juga melakukan audiensi dengan Kepala Biro Kerja Sama Antar-Parlemen, Ibu Endah T.D. Retnoastuti, di ruang kerjanya pada Kamis, 27 September 2018 (foto dan video kegiatan terlampir). Kepala Biro meminta agar berita-berita penting yang terkait fungsi utama di DPR juga diberitakan. Penulis menyampaikan bahwa hal tersebut sudah masuk dalam program jangka panjang aktualisasi CPNS ini.

Dalam mengaktualisasikan nilai-nilai dasar profesi ASN yaitu etika publik, akuntabilitas, dan komitmen mutu terhadap kualitas pelaksanaan kegiatan koordinas dengan pimpinan di Bagian Minluna, komunikasi dan koordinasi pelaksanaan selama aktualisasi penerjemahan dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian, salah satu fungsi Setjen dan BK DPR RI dalam koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi bisa tercapai.

Adapun manfaat dari kegiatan koordinasi ini adalah sebagai berikut:

- A. Bagi Penulis: koordinasi yang baik dapat memperlancar pelaksanaan aktualisasi.
- B. Bagi Bagian Minluna: kegiatan ini dapat meningkatkan koordinasi dengan para penerjemah dalam rangka pengembangan keterampilan penerjemah.
- C. Bagi Stakeholder: koordinasi semacam ini diperlukan agar visi dan misi Setjen dan BK DPR RI selalu diterapkan dalam setiap kegiatan unit kerja organisasi.

Seandainya kegiatan koordinasi ini tidak diaktualisasikan dengan nilai-nilai dasar ASN, pembimbingan terhadap CPNS penerjemah tidak akan berjalan lancar, dan penulis tidak akan mendapatkan arahan yang dibutuhkan.

2. Berkoordinasi dengan Bidang Data dan Teknologi Informasi

Koordinasi dengan Bidang Data dan Teknologi Informasi (BDTI) dilakukan beberapa kali, seperti pada rapat dalam Rangka Perancangan Sistem Aplikasi oleh Bapak Sartomo pada Rabu 30 Mei 2018 dan konsinyering di Wisma DPR RI, Kopo, Bogor pada 30 Agustus 2018. Dalam pertemuan pertama, BDTI menyatakan akan membantu membuat menu khusus bernama “News” di website www.dpr.go.id serta membuka akses berita-berita terkait BKSAP sehingga staf Minluna bisa mengunggah berita tersebut ke dalam website. Sedangkan pada rapat berikutnya, dilakukan sejumlah penyempurnaan seperti pemunculan menu “News” di website versi mobile. Seluruh rapat koordinasi ini dilakukan berdasarkan prinsip **Whole of Government**.

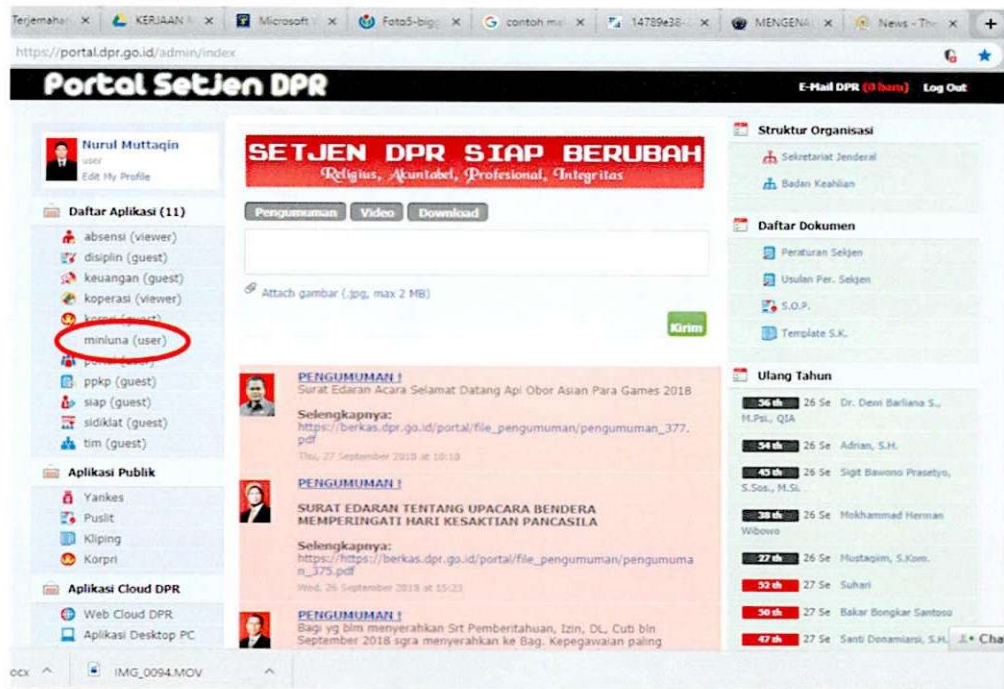
Proses pengunggahan berita berjalan lancar dan hampir tidak ada hambatan berarti. Di awal-awal pemunculan menu “News” pada situs www.dpr.go.id sempat keluar seluruh *template* berita dari berbagai Alat Kelengkapan, tidak hanya dari BKSAP. Namun hal itu bisa diatasi dengan berkomunikasi dengan staf BDTI melalui forum-forum informal. Pada acara IPPP, misalnya, penulis menjadi *liaison officer* bersama dengan staf BDTI, Erdinal. Saat itu, terdapat permasalahan berupa *template* berita Alat Kelengkapan dewan muncul semua di menu “News”. Dengan menunggu momen yang tepat saat sarapan pagi, penulis menyampaikan dengan tutur kata yang sopan meminta agar yang dimunculkan hanya *template* berita BKSAP. Dalam hal ini penulis telah menjalankan prinsip dasar ASN **Etika Publik**. Kurang dari seminggu kemudian, apa yang disampaikan penulis bisa dipenuhi.

Setelah itu, pengunggahan berita berjalan lancar sampai laporan ini dibuat. Untuk mengunggah berita terjemahan ke dalam website, seorang staf di Bagian Minluna cukup membuka portal miliknya dan mengunggah berita melalui aplikasi “Daftar Berita BKSAP” yang telah disediakan. Dalam aplikasi tersebut disediakan dua kolom, yakni kolom untuk teks berita berbahasa Indonesia dan kolom untuk bahasa Inggris. Berita terjemahan

dimasukkan ke dalam kolom bahasa Inggris. Setelah tombol “Kirim” diklik, seketika itu juga berita muncul di website DPR.

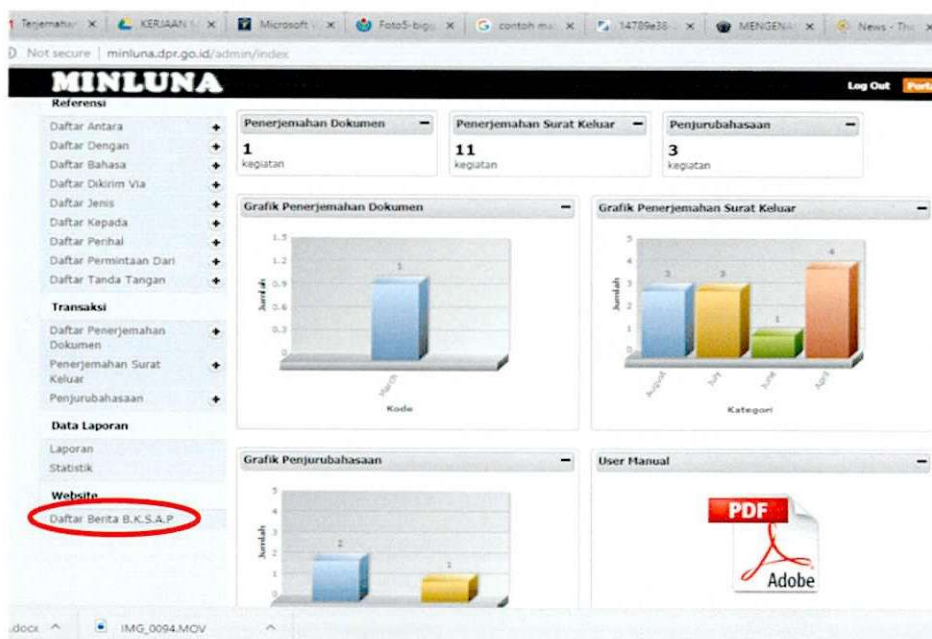
Berikut adalah alur pengunggahan berita terjemahan ke dalam website www.dpr.go.id:

Gambar 1



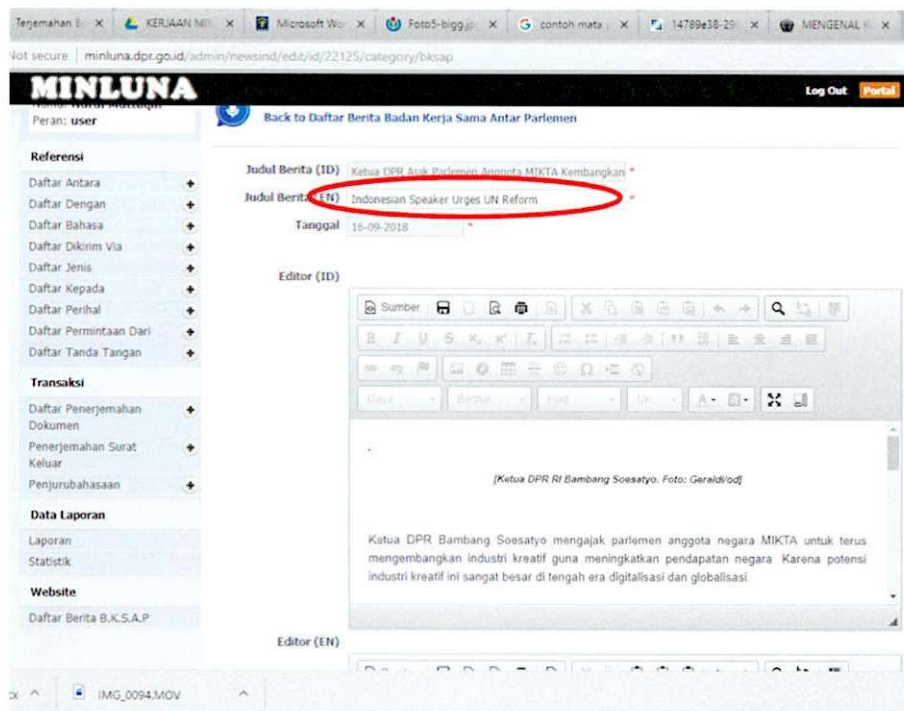
Pertama-tama, penulis mengklik aplikasi Miniluna seperti terlihat pada Gambar 1 di atas. Setelah aplikasi tersebut diklik, akan muncul dialog sebagai berikut:

Gambar 2



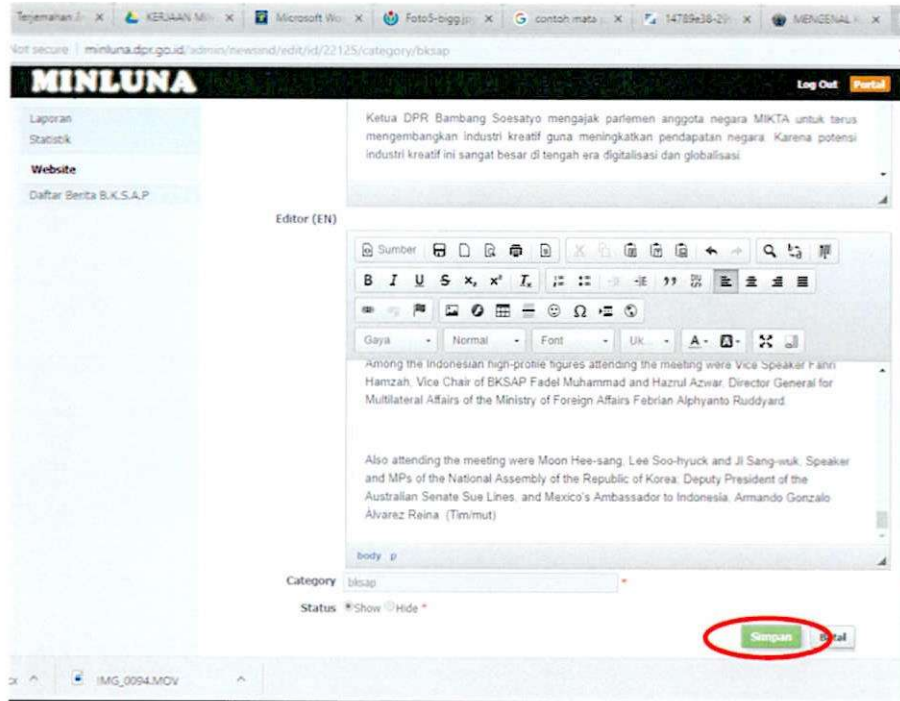
Gambar 2 memperlihatkan tampilan aplikasi Bagian Minluna yang hanya dapat diakses oleh staf Bagian Minluna. Di daftar aplikasi paling bawah, terdapat “Daftar Berita BKSAP”. Tahap berikutnya adalah memasukkan judul berita terjemahan ke dalam kolom yang sudah disediakan (lihat Gambar 3 di bawah). Kolom atas adalah untuk judul berita asli berbahasa Indonesia.

Gambar 3



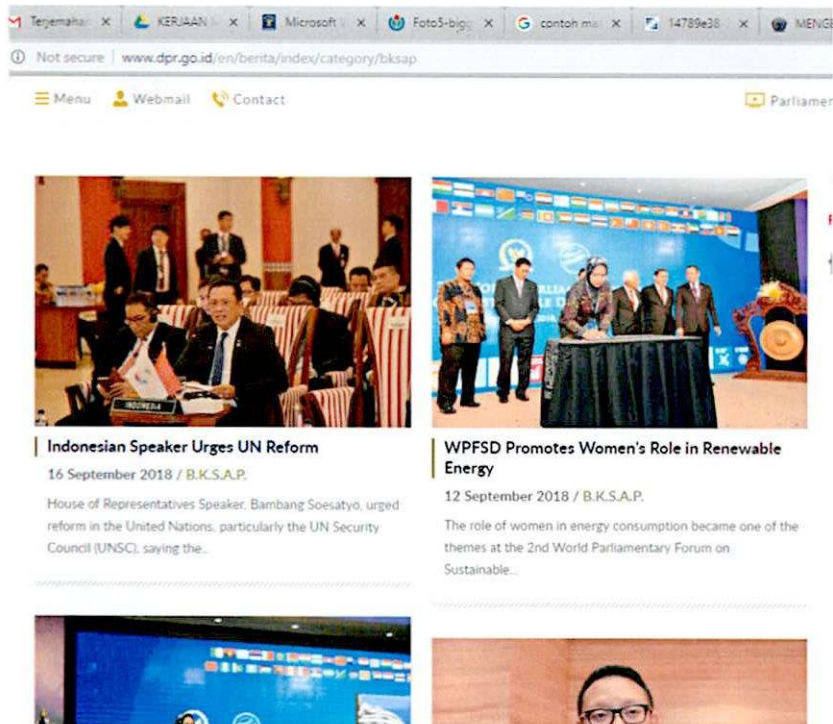
Tahap berikutnya adalah memasukkan tubuh berita ke dalam kolom yang sudah disediakan (seperti terlihat di Gambar 4). Teks tubuh berita bahasa Inggris dimasukkan ke dalam kolom yang sudah disediakan:

Gambar 4



Begitu tombol “Simpan” diklik, seketika itu juga berita tayang di menu “News” pada situs www.dpr.go.id. Seperti dapat dilihat pada Gambar 5 di bawah ini:

Gambar 5



Dengan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar profesi ASN yaitu Whole of Government dan Etika Publik terhadap kualitas pelaksanaan kegiatan

berkoordinasi dengan BDTI, berita-berita berbahasa Inggris bisa dinikmati oleh para pembaca. Dengan demikian, peran parlemen dalam diplomasi parlemen salah satunya bisa terbantu dengan adanya menu berita berbahasa Inggris ini.

Adapun manfaat dari kegiatan koordinasi dengan BDTI adalah sebagai berikut:

- A. Bagi penulis: koordinasi yang baik dapat meminimalkan kesulitan pengunggahan berita dengan cepat. Penulis juga semakin memahami teknis unggah berita dan prosedur-prosedur yang harus dilakukan.
- B. Bagi Bagian Minluna: kegiatan ini dapat menjadi bahan penyiapan koordinasi untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas berita terjemahan.
- C. Bagi *Stakeholder*: berita dapat dibaca dengan mudah dari mana pun dan kapan pun.

Seandainya kegiatan koordinasi ini tidak diaktualisasikan dengan nilai-nilai dasar ASN, akan muncul kesulitan dalam pengunggahan berita dan berita tidak bisa dibaca dalam berbagai *platform*, misalnya melalui telepon seluler, serta tidak akan memenuhi kebutuhan masyarakat internasional untuk mendapatkan informasi terkait kegiatan DPR RI.

3. Pendistribusian Berita-berita yang Akan Diterjemahkan ke Dalam Bahasa Inggris

Dalam menginventaris berita, penulis awalnya berencana meminta daftar-daftar berita tersebut kepada Biro Pemberitaan Parlemen. Namun, setelah berkonsultasi dengan mentor, disepakati bahwa daftar berita itu adalah berita-berita yang sudah dimuat di website DPR RI.

Berita-berita tersebut kemudian diunduh dan disimpan untuk selanjutnya dibagikan kepada para penerjemah. Akan tetapi melihat kesibukan para penerjemah senior (ada empat penerjemah senior), penulis berinisiatif bahwa yang menerjemahkan adalah penerjemah CPNS yang berjumlah tiga orang termasuk penulis. Sedangkan para penerjemah senior berperan sebagai editor.

Dalam menyampaikan naskah berita hasil terjemahan CPNS, saya melihat terlebih dahulu kondisi dan kesibukan penerjemah senior. Seandainya situasi dan kondisi memungkinkan, baru naskah terjemahan

tersebut saya sampaikan. Dengan cara itu penulis telah menjalankan nilai dasar profesi ASN berupa **Etika Publik**.

Untuk menjaga kualitas terjemahan, saya meminta penerjemah senior mengedit hasil terjemahan. Hal ini merupakan wujud dari **Komitmen Mutu** yang penulis lakukan. Kualitas penerjemahan yang baik juga turut mendukung fungsi Bagian Minluna di Biro KSAP sebagai pelayanan alih bahasa, penyiapan bahan/materi dan pelayanan rapat dalam rangka kegiatan luar negeri anggota.

Mengenai jumlah berita yang sudah diterjemahkan dan diedit, sampai laporan ini dibuat, mencapai 20 buah (lihat lampiran). Pendistribusian kepada penerjemah senior dilakukan melalui email. Dengan email pula, editor mengembalikan hasil koreksian kepada penerjemah. Menurut penulis, sebenarnya jumlah tersebut bisa ditingkatkan. Namun, karena kesibukan masing-masing penerjemah dan Bagian Minluna, jumlah berita hanya bisa sampai 20 buah.

Dengan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar profesi ASN yaitu etika publik dan komitmen mutu terhadap kualitas pelaksanaan kegiatan pendistribusian bahan berita terjemahan, distribusi berita kepada penerjemah maupun penerjemah senior bisa berjalan dengan lancar. Dengan demikian, fungsi Bagian Minluna yang salah satunya sebagai pelayanan alih bahasa bisa terwujud.

Sedangkan manfaat dari kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

- A. Bagi penulis: penyimpanan berita hasil terjemahan bisa dilakukan dengan lebih rapi sehingga mempermudah proses administrasi.
- B. Bagi Bagian Minluna: kegiatan ini dapat menjadi bahan peningkatan kualitas penerjemahan karena banyak pengetahuan baru yang dapat dibagikan kepada penerjemah yang lebih yunior.
- C. Bagi Stakeholder: secara tidak langsung masyarakat dapat melihat betapa beragamnya penerjemahan di DPR RI.

Seandainya kegiatan pendistribusian ini tidak diaktualisasikan dengan nilai-nilai dasar profesi ASN, penerjemahan berita akan mengalami hambatan karena kesibukan setiap penerjemah, sehingga pendistribusian ini harus dilakukan dengan cermat melihat beban kerja penerjemah saat itu.

4. Berkoordinasi dengan Biro Pemberitaan Parlemen

Tahap ini pernah dinyatakan akan dilewati saja, karena tanpa berkoordinasi dengan Biro Pemberitaan pun penerjemahan berita sudah berjalan. Akan tetapi guna menjaga nilai dasar ASN yaitu **Akuntabilitas** dan **Whole of Government**, koordinasi dengan Biro Pemberitaan Parlemen tetap harus dilakukan, apalagi ternyata ada beberapa poin penting yang harus didiskusikan.

Pertama adalah mengenai penulisan inisial penerjemah dan tanda pemisah antara inisial penerjemah dengan penulis dan editor berita asli. Oleh Biro Pemberitaan, hal itu diserahkan sepenuhnya kepada kesepakatan internal Bagian Minluna. Penulis dan rekan-rekan CPNS penerjemah kemudian sepakat bahwa untuk inisial Nurul Muttaqin adalah (mut), Yudi Chandri Setiawan (chan), dan Abdul Muiz (uiz). Hanya untuk tanda pemisah, Biro Pemberitaan merekomendasikan penggunaan tanda “/” seperti yang selama ini digunakan untuk memisahkan inisial penulis berita dan editor. Rapat koordinasi ini merupakan upaya **Komitmen Mutu** hasil terjemahan.

Poin penting kedua adalah wacana penerjemahan pesan-pesan singkat yang diunggah melalui media sosial DPR RI. Dalam rapat yang digelar dengan Biro Pemberitaan, wacana ini disambut baik pimpinan Bagian Minluna. Namun hal itu akan dilaporkan kepada pejabat yang berwenang terlebih dahulu. Para penerjemah pun menyambut baik rencana tersebut. Kerja sama seperti ini tentunya turut mendukung visi organisasi agar semua kegiatannya bisa diakses oleh dunia internasional.

Tahapan kegiatan berikutnya adalah penulis melaksanakan kesepakatan yang dicapai dengan Biro Pemberitaan Parlemen, yaitu menggunakan tanda “/” sebagai pemisah. Selama ini, penulis menggunakan tanda “-” sebagai tanda pemisah. Dalam melaksanakan kesepakatan ini penulis telah melakukan prinsip **Whole of Government**.

Dalam mengaktualisasikan nilai-nilai dasar profesi ASN yaitu akuntabilitas, *whole of government*, dan komitmen mutu terhadap kualitas pelaksanaan kegiatan koordinasi dengan Biro Pemberitaan Parlemen, teknis penulisan berita terutama penulisan nama penerjemah bisa dilakukan dengan baik dan dapat diterima oleh semua pihak. Dengan demikian, kontribusi terhadap fungsi Setjen dan BK DPR RI dalam

koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas, dan pelayanan informasi di lingkungan Setjen dapat terwujud.

Sedangkan manfaat dari kegiatan koordinasi dengan Biro Pemberitaan adalah sebagai berikut:

- A. Bagi Penulis: penulis memahami secara sekilas alur kerja Biro Pemberitaan mulai dari peliputan hingga penyajian berita.
- B. Bagi Bagian Minluna: kegiatan ini dapat menjadi bahan koordinasi lebih lanjut terkait pelaksanaan alih bahasa terhadap unit lain di lingkungan Setjen dan BK DPR RI.
- C. Bagi *Stakeholder*: kegiatan-kegiatan di DPR RI akan terpublikasi lebih luas ke masyarakat internasional melalui berbagai *platform* pemberitaan.

Seandainya kegiatan koordinasi ini tidak diaktualisasikan dengan nilai-nilai dasar ASN, akan timbul permasalahan etika karena penerjemahan ini tidak diketahui oleh pembuat berita. Selain itu, tidak adanya standar-standar teknis terkait akan memunculkan ketidakseragaman teknis penulisan antara berita terjemahan dengan berita sumber.

5. Penyusunan Buku Panduan Langgam Berita Berbahasa Inggris

Mengawali kegiatan pembuatan buku langgam penulisan jurnalistik, penulis banyak membaca referensi berita-berita berbahasa Inggris seperti *The Jakarta Post* langganan kantor. Hal itu penulis lakukan untuk memahami kebiasaan-kebiasaan umum yang dipakai dalam penulisan berita dalam bahasa Inggris. Sehingga mutu buku panduan nantinya akan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini penulis telah menjalankan nilai dasar **Komitmen Mutu**. Selain *The Jakarta Post* penulis mencari referensi berita dari situs berita luar negeri seperti *Reuters*, *CNN*, dan *The Washington Post*. Berbagai kumpulan istilah yang ada di situs-situs tersebut penulis pilih untuk kemudian dikumpulkan menjadi semacam glosarium. Harapannya agar terjemahan berita terlihat Profesional menyerupai situs berita komersial.

Tahapan berikutnya adalah mencari buku yang bisa dijadikan referensi bagi panduan jurnalistik. Kepada mentor, penulis sampaikan bahwa penulis sudah memiliki beberapa buku panduan jurnalistik berbahasa Inggris dalam bentuk fisik maupun PDF. Dalam

pelaksanaannya, materi yang dituangkan dalam buku hampir sama persis seperti yang ada di buku rujukan. Hal itu dilakukan sebagai upaya menjaga kualitas buku. Alasan lainnya adalah, buku ini lebih bersifat sebagai rangkuman panduan, bukan sebagai pemunculan kaidah atau temuan-temuan baru dalam penulisan jurnalistik. Dan hal ini pun sudah penulis sampaikan kepada mentor sebagai bentuk **Akuntabilitas**. Penulis sampaikan bahwa isi hampir tidak ada yang berubah dari buku rujukannya. Mentor pun hanya mengedit kata pengantar (*preface*) yang memang penulis buat sendiri (lihat lampiran).

Kegiatan berikutnya adalah mulai memilih materi yang paling cocok untuk penulisan berita *online*, karena hasil terjemahan nantinya hanya akan ditampilkan di situs www.dpr.go.id. Selain itu sampul depan juga mulai dikonsep hingga jadilah sampul buku seperti sekarang (lihat lampiran). Saat merancang judul buku, penulis awalnya memilih *Manual for News Writing for the Web 2018*. Namun setelah disampaikan kepada mentor, judul disepakati menjadi *Guide to Writing News Articles*. Penulis mendapatkan pengetahuan baru setelah diberi arahan dari mentor. Pemahaman baru itu tentunya akan semakin memperkuat kualitas buku sehingga penulis bisa menerapkan **Komitmen Mutu**.

Untuk sampul buku, penulis mendesainnya dengan program pengolah vektor CorelDraw. Kemudian setelah melalui sejumlah perbaikan, hasil desain itu penulis cetak ke percetakan. Sebenarnya sampul bisa dicetak dengan printer biasa di kantor. Namun sebagai upaya untuk melaksanakan **Komitmen Mutu**, penulis memilih mencetak sampul di percetakan, yakni di Snapy di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta. Penulis memilih sampul jenis *soft cover* dengan sentuhan akhir *doff* sehingga hasilnya terlihat eksklusif. Untuk isi buku, penulis memilih mencetaknya di kantor dengan printer yang tersedia. Total halaman buku mencapai 34 halaman sudah termasuk sampul.

Buku tersebut kemudian disebarkan kepada penerjemah lain. Akan tetapi, penulis mengakui idealnya buku tersebut dibagikan pada tahap awal aktualisasi sehingga bisa menjadi salah satu rujukan dalam menerjemahkan atau mengedit. Kendala yang dihadapi penulis waktu itu adalah bahwa penulis harus berkejaran dengan waktu untuk menerjemahkan berita terlebih dahulu sehingga bisa diunggah ke website melalui aplikasi yang sudah dibuat oleh BDTI di awal-awal tahap

aktualisasi. Penulis menyampaikan hal ini kepada para penerjemah lain dengan bahasa yang bisa dimengerti sehingga nilai **Etika Publik** bisa diterapkan. Sangat terbuka kemungkinan perbaikan isi buku. Masukan dari penerjemah senior akan menjadi catatan penulis untuk menyempurnakan isi. Pengalaman para penerjemah senior selama bertahun-tahun tentu akan menjadi masukan berharga untuk buku ini.

Dengan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar profesi ASN yaitu komitmen mutu, akuntabilitas, dan etika publik terhadap kualitas pelaksanaan kegiatan penyusunan buku pakem penulisan berita dalam bahasa Inggris, sebuah buku panduan berhasil diterbitkan. Dengan demikian, tugas Bagian Minluna sebagai pelayanan alih bahasa semakin menguat.

Sedangkan manfaat dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- A. Bagi penulis: memperkaya pemahaman terkait kebiasaan-kebiasaan penulisan berita dalam bahasa Inggris.
- B. Bagi Bagian Minluna: buku ini dapat menjadi salah satu referensi bagi penerjemah dalam menerjemahkan dan mengedit berita.
- C. Bagi *Stakeholder*: pembaca secara tidak langsung mudah memahami berita karena ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami dan mendekati standar media profesional.

Seandainya kegiatan penyusunan buku ini tidak diaktualisasikan dengan nilai-nilai dasar ASN, tidak akan terbit sebuah buku dengan isi dan kualitas yang bisa dipertanggungjawabkan. Di samping itu, transfer ilmu dari penerjemah senior kepada yang lebih yunior tidak akan terjadi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan aktualisasi yang telah dijalankan penulis di Bagian Administrasi Kegiatan Luar Negeri Anggota, Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, sudah mengaktualisasikan nilai-nilai dasar profesi ASN. Lima kegiatan yang sudah diaktualisasikan penulis di unit kerja ini berlangsung mulai 23 Mei 2018 hingga 28 September 2018. Lima kegiatan itu adalah:

1. Berkoordinasi dengan atasan di Bagian Minluna dengan nilai-nilai dasar yang diaktualisasikan adalah etika publik, akuntabilitas, dan komitmen mutu.
2. Berkoordinasi dengan Bidang Data dan Teknologi Informasi dengan nilai-nilai dasar yang diaktualisasikan adalah *whole of government* dan etika publik.
3. Mendistribusikan berita-berita yang akan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan nilai-nilai dasar yang diaktualisasikan adalah etika publik dan komitmen mutu.
4. Berkoordinasi dengan Biro Pemberitaan Parlemen dengan nilai-nilai dasar yang diaktualisasikan adalah akuntabilitas, *whole of government*, dan komitmen mutu.
5. Menyusun buku pakem penulisan berita dalam bahasa Inggris dengan nilai-nilai dasar yang diaktualisasikan adalah komitmen mutu, akuntabilitas, dan etika publik.

Penulis belajar banyak dari kegiatan pengaktualisasian nilai-nilai dasar profesi ASN. Di antaranya meningkatkan kemampuan penulis dalam mewujudkan etika publik, akuntabilitas, komitmen mutu, dan *whole of government*. Aktualisasi ini sangat sesuai dengan tugas dan fungsi penulis sebagai penerjemah pertama yang ditempatkan di Bagian Minluna. Aktualisasi ini berjalan optimal seperti halnya tugas-tugas lain yang diberikan atasan setiap hari. Antar tugas pokok dan aktualisasi bisa berjalan beriringan.

Seandainya dalam melaksanakan aktualisasi ini penulis tidak menerapkan prinsip-prinsip dasar profesi ASN, aktualisasi jelas tidak akan mencapai hasil yang optimal, bahkan bisa jadi tidak akan berhasil sama

sekali. Sehingga, penulis tidak akan memberikan kontribusi berharga pada fungsi Bagian Minluna dalam pelayanan alih bahasa bagi Anggota Dewan ataupun bagi bagian lain di Setjen dan BK DPR RI.

B. Saran

Berdasarkan proses pembelajaran klasikal dan nonklasikal Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Setjen dan BK DPR RI, hingga penyusunan laporan aktualisasi ini, penulis dapat menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Untuk Penyelenggara Pelatihan

Penyelenggara telah berupaya maksimal menyukseskan Latsar ini dan hal itu sangat dirasakan oleh penulis. Secara teknis penyelenggaraan, tidak ada masalah atau kendala berarti yang dialami penulis selama mengikuti Latsar. Namun jika ada yang boleh ditambahkan, hal itu adalah porsi pembelajaran luar kelas, agar peserta bisa mengaplikasikan materi secara lebih mantap.

2. Untuk Instansi/Unit Kerja Peserta

Aktualisasi ini beserta *output* yang dihasilkan agar bisa didukung dan ditingkatkan baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Selain itu, *output* yang bersifat panduan agar bisa dikoreksi dan dijadikan salah satu acuan bersama.

LAMPIRAN KEGIATAN

KEGIATAN KE-1



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

LAPORAN SINGKAT KEGIATAN I BERKOORDINASI DENGAN ATASAN DI BAGIAN MINLUNA

Nama Kegiatan : Konsultasi dengan Pimpinan Bagian Administrasi Kegiatan Luar Negeri Anggota (Minluna) tentang Rancangan Aktualisasi Latsar CPNS Setjen dan BK DPR RI

Hari/Tanggal : Rabu, 23 Mei 2018

Waktu : Pukul 14.50 – 15.12 WIB

Tempat : Ruang Pimpinan Bagian Minluna
Gd. Nusantara III Lt.6

Peserta

1. Bapak Sartomo, S.S., M.Si. (Kepala Bagian Minluna)
2. Ibu Elvira Dianti A., S.S., M.Si. (Kasubbag Alih Bahasa)
3. Nurul Muttaqin, S.S. (Penerjemah Ahli Pertama)

Ringkasan Hasil Pertemuan

1. Penulis menyampaikan garis besar hasil Latihan Dasar CPNS Golongan III Setjen dan BK DPR RI yang dilakukan secara klasikal selama lebih kurang satu bulan. Kemudian penulis menyampaikan rencana aktualisasi yang akan dijalankan selama menjalani habituasi dalam waktu tiga bulan.
2. Pimpinan mendukung rancangan aktualisasi yang membahas mengenai masih kurangnya berita-berita berbahasa Inggris di situs www.dpr.go.id tentang kegiatan Anggota Dewan saat menerima delegasi dari negara lain. Oleh Ibu Elvira, penulis disarankan untuk menerjemahkan berita-berita khusus terkait kegiatan anggota dewan yang berhubungan dengan Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP). Hal itu bertujuan agar lingkup penerjemahan tidak terlalu luas karena ada begitu banyak berita yang diunggah di www.dpr.go.id.
3. Untuk dapat menjamin kualitas hasil penerjemahan, disarankan untuk melakukan koordinasi dengan penerjemah lain. Dalam praktiknya, hasil terjemahan tersebut harus diedit oleh penerjemah yang lebih senior. Ibu Elvira menyarankan agar penulis banyak mencari referensi berita-berita dari media berbahasa Inggris, misalnya *The Jakarta Post*, atau melalui situs-situs berita asing lainnya.
4. Bapak Sartomo mengatakan hasil rancangan ini juga akan diintegrasikan ke dalam proyek perubahan program pembangunan sistem dokumentasi dan pelaporan hasil kerja penerjemah dalam versi bahasa Inggris yang kebetulan tengah dirancang oleh Bapak Sartomo, yang saat ini mengikuti Diklatpim III. Penulis menyampaikan terima kasih karena dalam perjalanannya nanti penulis akan banyak terbantu dengan program Bapak Sartomo sebab ada beberapa bagian yang berurusan.
5. Bapak Sartomo menyampaikan bahwa penulis agar bersungguh-sungguh menjalankan proyek ini. Sebab, jika penulis gagal dalam proyek ini, status CPNS penulis bisa dibatalkan dan tidak bisa mengikuti rekrutmen CPNS berikutnya. Hal yang sama juga Bapak Sartomo sampaikan kepada dua CPNS penerjemah lain yang juga tengah mengikuti latihan dasar.

6. Selanjutnya penulis dapat memulai menjalankan aktualisasi dan melaporkan setiap perkembangan kepada pimpinan.

Mengetahui,
Mentor



Fasrudin Arief Budiman, S.S., M.Si.
NIP. 197011051997031007

Yang membuat,



Nurul Muttaqin, S.S.
198608062018021001

Dokumentasi Kegiatan



Penulis melakukan koordinasi dengan pimpinan Minluna, Kepala Bagian Minluna Bapak Sartomo, S.S., M.Si. (kanan) dan Kasubbag Alih Bahasa Ibu Elvira Dianti A., S.S., M.Si. (tengah) di Ruang Pimpinan Bagian Minluna, Gd. Nusantara III Lt.6, pada 23 Mei 2018.



Audiensi dengan Ibu Endah T.D. Retnoastuti, Kepala Biro Kerja Sama Antar-Parlemen, di ruang kerjanya.



Testimoni Ibu Endah T.D. Retnoastuti terkait Pelaksanaan Aktualisasi penulis

Bukti Pengendalian Pembelajaran Aktualisasi oleh Mentor

Nama Peserta	:	Nurul Muttaqin, S.S.
NIP	:	198608062018021001
Unit Kerja	:	Bagian Administrasi Kegiatan Luar Negeri Anggota
Jabatan	:	Calon Penerjemah Ahli Pertama
Isu	:	Masih kurangnya berita-berita berbahasa Inggris di situs dpr.go.id tentang kegiatan Anggota Dewan saat menerima delegasi dari negara lain.

- 1) Kegiatan 1: Berkoordinasi dengan atasan di Bagian Administrasi Kegiatan Luar Negeri Anggota

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan	Mengumpulkan bahan ² berita yang akan diterjemahkan	ff
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	Memperjelas informasi untuk negara-negara sahabat	ff
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Sangat terkait karena penting u/ penyampaian informasi	ff
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	Penting untuk penyampaian berita Parlemen terkini	ff
Penguatan Nilai Organisasi	Dapat meningkatkan profesionalisme	ff

- 2) Kegiatan 2: Berkoordinasi dengan Bidang Data dan Teknologi Informasi (BDTI)

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan	Koordinasi dengan BDTI	ff
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	Pembuatan nota dinas tampilan di website DPR	ff
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Implementasi WOG	ff
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	Sebagai penyampai informasi	ff
Penguatan Nilai Organisasi	Integratif	ff

Bukti Pengendalian Pembelajaran Aktualisasi oleh Coach

Nama Peserta	:	Nurul Muttaqin, S.S.
NIP	:	198608062018021001
Unit Kerja	:	Bagian Administrasi Kegiatan Luar Negeri Anggota
Jabatan	:	Calon Penerjemah Pertama
Isu	:	Masih kurangnya berita-berita berbahasa Inggris di situs dpr.go.id tentang kegiatan Anggota Dewan saat menerima delegasi dari negara lain.

- 1) Kegiatan 1: Berkoordinasi dengan atasan di Bagian Administrasi Kegiatan Luar Negeri Anggota

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Coaching	Waktu dan Media Coaching
Tahapan Kegiatan	<i>tahapan koordinasi dgn Senior Dilatka & baik, Lanjutkan</i>	<i>Proses</i> <i>ndi</i>
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	<i>Laporan singkat hasil koordinasi OK</i>	<i>ndi</i>
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	<i>OK Erika Public, Akuntabilitas</i>	<i>ndi</i>
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	<i>Kordinasi mendukung Tusi Penerjemah</i>	<i>ndi</i>
Penguatan Nilai Organisasi	<i>OK Profesional, Akuntabel</i>	<i>ndi</i>

KEGIATAN KE-2



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

Nomor : DP/16493/Setjen DPR RI/AP.04/09-2018
Sifat : Penting
Derajat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Undangan

25 September 2018

Yth.

Kepala Bidang Data dan Teknologi Informasi
Pusat Data dan Informasi Setjen dan BK DPR RI
Jakarta

Dengan hormat kami beri tahukan, bahwa dalam rangka Habitiasi Pelatihan Dasar CPNS Golongan III di lingkungan Biro Kerja Sama Antar-Parlemen Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, di mana kegiatan habitiasi tersebut menerjemahkan berita terkait kegiatan BKSAP di www.dpr.go.id, sehubungan dengan itu kami mengundang Kepala Bidang Data dan Teknologi Informasi atau jajarannya pada:

Hari, tanggal : Kamis, 27 September 2018
Waktu : Pukul 10.00 – Selesai
Tempat : Ruang Rapat AIPA
Gd. Nusantara III DPR RI Lt. 6
Acara : Konsultasi mengenai teknis pengunggahan berita terkait kegiatan BKSAP di website www.dpr.go.id.

Atas perhatian dan kehadiran Saudara kami mengucapkan terima kasih

Kabag Set. Administrasi
Kegiatan Luar Negeri Anggota

Sartomo, S.S., M.Si
NIP. 196808111996031001



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

Nomor : DP/~~16443~~Setjen DPR RI/AP.04/09-2018
Sifat : Penting
Derajat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Undangan**

25 September 2018

Yth.

Para Pejabat Fungsional Penerjemah

Biro Kerja Sama Antar-Parlemen Setjen dan BK DPR RI

Jakarta

Dengan hormat kami beri tahukan, bahwa dalam rangka Habitiasi Pelatihan Dasar CPNS Golongan III di lingkungan Biro Kerja Sama Antar Parlemen Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, di mana kegiatan habituasi tersebut menerjemahkan berita terkait kegiatan BKSAP di www.dpr.go.id, sehubungan dengan itu kami mengundang Saudara pada:

Hari, tanggal : Kamis, 27 September 2018
Waktu : Pukul 10.00 – Selesai
Tempat : Ruang Rapat AIPA
Gd. Nusantara III DPR RI Lt. 6
Acara : Konsultasi mengenai teknis penerjemahan berita terkait kegiatan BKSAP di website www.dpr.go.id.

Atas perhatian dan kehadiran Saudara kami mengucapkan terima kasih

Kabag Set. Administrasi
Kegiatan Luar Negeri Anggota

Sartomo, S.S., M.Si
NIP. 196808111996031001



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

LAPORAN SINGKAT KEGIATAN 2 BERKOORDINASI DENGAN BIDANG DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

Nama Kegiatan : Rapat Koordinasi Bagian Administrasi Kegiatan Luar Negeri Anggota (Minluna) dengan Bidang Data dan Teknologi Informasi (BDTI) tentang teknis pengunggahan berita terjemahan terkait kegiatan BKSAP dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris ke dalam website www.dpr.go.id

Hari/Tanggal : Kamis, 26 September 2018

Waktu : Pukul 10.00 – 11.15 WIB

Tempat : Ruang Rapat ALPA
Gedung Nusantara 3 Lt. 6

Peserta

1. Bapak Sartomo, SS, M.Si. (Kabag Minluna)
2. Ibu Elvira Dianti A., SS, M.Si (Kasubbag Alih Bahasa)
3. Fasrudin Arief Budiman, S.S., M.Si. (Penerjemah Ahli Madya)
4. Novri Helmawan, S.Pd. (Penerjemah Ahli Muda)
5. Andriaji Gumilar Laksanaputra, S.S. (Penerjemah Ahli Pertama)
6. Martrisa Canda Chaniago, S.Pd. (Penerjemah Ahli Muda)
7. Abdul Muiz, S.Pd. (Penerjemah Ahli Pertama)
8. Nurul Muttaqin, S.S. (Penerjemah Ahli Pertama)
9. Yudi Chandri Setiawan, S.Pd. (Penerjemah Ahli Pertama)
10. Para Staf Minluna
11. Wiranto Utomo, S.Si., M.Kom (BDTI)
12. Erdinal H, ST, M.Sc., (BDTI)
13. Airlangga E. W. S.Kom., M.T.I, (BDTI)

Ringkasan Hasil Pertemuan

1. Rapat ini dipimpin dan dibuka oleh Kepala Bagian Minluna Bapak Sartomo, SS, M.Si. pada pukul 10.00.
2. Rapat ini mengagendakan pemantapan teknis pengunggahan berita terjemahan ke dalam website www.dpr.go.id. Ini adalah pertemuan kesekian setelah digelar sejumlah rapat sebelumnya, misalnya rapat dalam Rangka Perancangan Sistem Aplikasi yang dibuat Bapak Sartomo pada Rabu 30 Mei 2018 dan konsinyering di Wisma DPR RI, Kopo, Bogor, pada 30 Agustus 2018. Dalam pertemuan pertama, BDTI menyatakan akan membuat menu khusus bernama "News" di website www.dpr.go.id untuk memuat berita-berita yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, serta membuka akses berita-berita terkait BKSAP sehingga staf Minluna bisa mengunggah berita tersebut ke dalam website. Sedangkan pada rapat berikutnya, dilakukan sejumlah penyempurnaan seperti pemunculan menu "News" di website versi mobile.
3. Untuk mengunggah berita di website, BDTI telah membuat aplikasi khusus yang bernama "Daftar Berita B.K.S.A.P" di portal internal Setjen dan BK DPR, dan menu

"News" di website. Seluruh staf Minluna bisa mengakses aplikasi tersebut dan mengunggah berita ke situs DPR RI.

4. Dalam perjalanannya, ketika diketik, menu "News" tidak hanya menampilkan berita-berita terkait kegiatan BKSAP, melainkan seluruh berita yang terkait kegiatan di DPR. Hal itu kemudian disampaikan dalam rapat berikutnya di Kopo, dan oleh BDTI hal tersebut bisa diatasi.
5. Sedangkan dalam rapat pemantapan kali ini, penulis menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerja sama yang telah dilakukan. Disampaikan pula bahwa sejauh ini tidak ada kendala berarti dalam pengunggahan berita, atau pada tampilan di situs DPR. Berita berbahasa Inggris sudah bisa diakses dengan mudah baik dalam versi desktop ataupun mobile. Pimpinan berharap ke depan tidak hanya berita-berita BKSAP yang diunggah melainkan berita-berita penting lain yang terkait dengan fungsi utama DPR RI.

Mengetahui,
Mentor



Fasrudin Arief Budiman, S.S., M.Si.
NIP. 197011051997031007

Yang membuat,



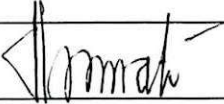
Nurul Muttaqin, S.S.
198608062018021001

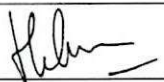
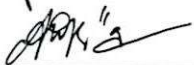


**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

DAFTAR HADIR

Tahun Sidang : 2018 - 2019
Masa Persidangan : I
Rapat Ke : --
Jenis Rapat : Rapat Koordinasi
Sifat Rapat : Tertutup
Hari, tanggal : Kamis, 27 September 2018
Waktu : Pukul 10.00 WIB. - selesai.
Tempat : Ruang Rapat AIPA
Gd. Nusantara III DPR RI Lt. 6
Ketua Rapat : Sartomo, S.S., MSi
A c a r a : 1. Konsultasi mengenai teknis pengunggahan berita terkait kegiatan
BKSAP di website www.dpr.go.id;
2. Lain-lain.

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Endah T.D Retnoastuti NIP. 196804021993022001	Kepala Biro KSAP	
2.	Sartomo, S.S., M.Si NIP. 196808111996031001	Kabag Set. Adm. Kegiatan Luar Negeri Anggota	
3.	Elvira Dianti A., S.S., M.Si. NIP. 196911271997032005	Kasubag Alih Bahasa	
4.	Murniwati Ermilya NIP. 196901181991032002	Analisis Kerja Sama Luar Negeri	
5.	Umiati, S.Sos. NIP. 197505051998032008	Analisis Kerja Sama Luar Negeri Subbag Penyiapan Adm	
6.	Andriani Sofiaty NIP. 197010081992032003	Penyiap Bahan Persidangan	
7.	Rusli Muhammad Jein NIP. 197807272002121005	Pengadministrasi Persidangan	
8.	Fasrudin Arief Budiman, S.S, M.Si NIP. 197011051997031007	Penerjemah Madya	

9.	Novri Helmawan, S.Pd NIP. 197711132009121002	Penerjemah Muda	
10.	Andriaji Gumilar Laksanaputra, S.S. NIP. 198408012009121003	Penerjemah Pertama	
11.	Martrisa Canda Chaniago, S.Pd. NIP. 198403312009122001	Penerjemah Muda	
12.	Abdul Muiz, S.Pd. NIP. 198602122018011001	Penerjemah Pertama	
13.	Nurul Muttaqin, S.S. NIP. 198608062018021001	Penerjemah Pertama	
14.	Yudi Chandri Setiawan NIP. 199112232018031001	Penerjemah Pertama	
15.	Airlangga Eka Wardhana, S.Kom, M.T.I NIP. 198210032009121001	Pranata Komputer Madya	
16.	Erdinal Hendradjaja, ST., M.Sc NIP. 198008132009121001	Pranata Komputer Muda	
17.	Wiranto Utomo, S.Si., M.Kom NIP. 197505132009121001	Pranata Komputer Muda	

Dokumentasi Kegiatan



Rapat koordinasi Bagian Minluna dengan staf BDTI dalam rangka pemantapan pengunggahan berita terjemahan ke dalam situs www.dpr.go.id di ruang rapat AIPA, Kamis, 27 September 2018.



Rapat Koordinasi Bagian Minluna dengan BDTI di Wisma DPR RI, Kopo, Bogor.

Bukti Pengendalian Pembelajaran Aktualisasi oleh Mentor

Nama Peserta	:	Nurul Muttaqin, S.S.
NIP	:	198608062018021001
Unit Kerja	:	Bagian Administrasi Kegiatan Luar Negeri Anggota
Jabatan	:	Calon Penerjemah Ahli Pertama
Isu	:	Masih kurangnya berita-berita berbahasa Inggris di situs dpr.go.id tentang kegiatan Anggota Dewan saat menerima delegasi dari negara lain.

- 1) Kegiatan 1: Berkoordinasi dengan atasan di Bagian Administrasi Kegiatan Luar Negeri Anggota

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan	Mengumpulkan bahan ² berita yang akan diterjemahkan	fb
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	Memperjelas informasi untuk negara-negara sahabat	fb
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Sangat terkait karena penting u/ penyampaian informasi	fb
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	Penting untuk penyampaian berita parlemen terkini	fb
Penguatan Nilai Organisasi	Dapat meningkatkan profesionalisme	fb

- 2) Kegiatan 2: Berkoordinasi dengan Bidang Data dan Teknologi Informasi (BDTI)

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan	Koordinasi dengan BDTI	fb
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	Pembuatan nota dinas tampilan di website DPR	fb
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Implementasi WOG	fb
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	sebagai penyampai informasi	fb
Penguatan Nilai Organisasi	Integritas	fb

Bukti Pengendalian Pembelajaran Aktualisasi oleh Coach

Nama Peserta	:	Nurul Muttaqin, S.S.
NIP	:	198608062018021001
Unit Kerja	:	Bagian Administrasi Kegiatan Luar Negeri Anggota
Jabatan	:	Calon Penerjemah Pertama
Isu	:	Masih kurangnya berita-berita berbahasa Inggris di situs dpr.go.id tentang kegiatan Anggota Dewan saat menerima delegasi dari negara lain.

2) Kegiatan 2: Berkoordinasi dengan Bidang Data dan Teknologi Informasi (BDTI)

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Coaching	Waktu dan Media Coaching
Tahapan Kegiatan	Kordinasi dgn BDTI di lakuu sesuai rencana	08/01/18 Pegangan. widi
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	Membuat "News" & aplikasi Daftar Berita BKSAP	widi
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	WOB, EP. Akuntabilitas OK -	widi
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	Kordinasi mendukung Tusi Program	widi
Penguatan Nilai Organisasi	Profesional & Akuntabel	widi

KEGIATAN KE-3

DAFTAR BERITA YANG DITERJEMAHKAN

No.	TANGGAL	JUDUL BERITA		Penerjemah/Editor
		Bahasa Indonesia	Bahasa Inggris	
1.	15 Mei 2018	Mendapat Legitimasi AS, Tindakan Israel Seperti Sebuah Genosida	Indonesian Lawmaker Accuses Israel of "Genocide" After Palestinian Protest	Nurul Muttaqin/Andriaji Gumilar Laksanaputra
2.	15 Mei 2018	Peresmian Kedutaan AS di Yerusalem Dinilai Suburkan Terorisme	The Opening of US Embassy in Jerusalem Triggers Terrorism	Abdul Muiz/ Fasrudin Arief Budiman
3.	18 Mei 2018	Inisiasi Forum Parlemen Dunia, DPR Dorong Isu Energi Terbarukan	Initiating World Parliamentary Forum, The Indonesian House Promotes Renewable Energy Issues	Yudi Chandri Setiawan/ Martrisa Canda Chaniago
4.	22 Mei 2018	Pengibaran Bendera Israel di Papua Nodai Perjuangan Diplomati Indonesia	Israeli Flag Raising in Papua Tarnished Indonesia's Diplomatic Struggle	Nurul Muttaqin/ Fasrudin Arief Budiman
5.	24 Mei 2018	Indonesia - Austria Ingin Kembangkan Kerja Sama	Indonesia, Austria to Further Cooperation	Nurul Muttaqin/ Fasrudin Arief Budiman
6.	5 Juni 2018	Menembak Mati Paramedis Razan, Israel Melanggar Hukum Internasional	Shooting Dead Paramedic Razan, Israel Violates International Law	Yudi Chandri Setiawan/ Andriaji Gumilar Laksanaputra
7.	21 Juni 2018	DPR Tetap Dukung Reformasi Dewan HAM PBB	DPR Committed to support the UN Human Right Council reform	Abdul Muiz/Andriaji Gumilar Laksanaputra
8.	21 Juni 2018	Kejahatan Narkoba Lebih Berbahaya Dibanding Terorisme	Drugs More Deadly Than Terrorism	Nurul Muttaqin/Andriaji Gumilar Laksanaputra
9.	28 Juni 2018	Kemenangan Erdogan, Peluang Perkuat Diplomasi RI Untuk Palestina	Erdogan Wins, Opportunity to Strengthen Indonesian Diplomacy For Palestine	Yudi Chandri Setiawan/ Andriaji Gumilar Laksanaputra
10.	29 Juni 2018	Indonesia Dukung Timor Leste Jadi Anggota ASEAN	Indonesia Supports Timor Leste to Join ASEAN	Nurul Muttaqin/ Fasrudin Arief Budiman
11.	23 Juli 2018	14 Negara Pasifik Hadiri Forum IPPP	14 Pacific Island Nations Gather in IPPP Forum to Promote Cooperation	Nurul Muttaqin/Novri Helmawan
12.	23 Juli 2018	DPR Akan Tingkatkan Kemitraan dengan Kawasan Pasifik	Indonesian House Enhance Partnership with Pacific Region	Yudi Chandri Setiawan/ Martrisa Canda Chaniago
13.	23 Juli 2018	Kemitraan Indonesia – Pasifik Perkuat Dukungan Internasional	Indonesia – Pacific Cooperation: Enhancing International Support	Abdul Muiz/Andriaji Gumilar Laksanaputra
14.	25 Juli 2018	Fadel dan Hasrul Jabat Pimpinan BKSAP	Fadel and Hasrul Elected New BKSAP Leaders	Nurul Muttaqin/Martrisa Canda Chaniago
15.	25 Juli 2018	WPFSD Ke-2 Angkat Isu Energi Berkelanjutan	2nd WPFSD Proposes Sustainable Energy Issue	Nurul Muttaqin/ Martrisa Canda Chaniago
16.	31 Juli 2018	GKSB DPR RI Terima Kunjungan Wakil Duta Besar Jepang	GKSB Meet with Keiichi Ono to Purse Improved Ties	Nurul Muttaqin/Novri Helmawan
17.	12 September	WPFSD 2018 Fokus pada Energi Terbarukan	Energi Terbarukan Menjadi Perhatian Serius	Nurul Muttaqin/ Martrisa Canda Chaniago

	2018		WPFSD 2018	
18.	12 September 2018	WPFSD Usung Tema Peran Perempuan dalam EBT	WPFSD Promotes Women's Role in Renewable Energy	Nurul Muttaqin/Andriaji Gumilar Laksanaputra
19.	16 September 2018	Ketua DPR Dorong Reformasi di Tubuh PBB	Indonesian Speaker Urges UN Reform	Nurul Muttaqin/ Fasrudin Arief Budiman
20.	16 September 2018	DPR Promosikan Industri Kreatif ke Dunia Internasional	Indonesian House Promotes Creative Industry	Nurul Muttaqin/Novri Helmawan

Mendapat Legitimasi AS, Tindakan Israel Seperti Sebuah Genosida
15-05-2018 / B.K.S.A.P.

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (BKSAP DPR RI) Rofi Munawar mengecam keras tindakan Israel yang telah membunuh lebih dari 55 warga Palestina di perbatasan Israel. Ironisnya ini terjadi bersamaan dengan prosesi pembukaan Kedubes AS di Yerusalem.

"Israel menembaki warga palestina dengan brutal dan membabitkan ke segala arah. Bukti bahwa negara tersebut telah sengaja melakukan tindakan 'genosida' dan pembunuhan terencana," disampaikan Rofi Munawar dalam rilis kepada Parlemenaria, Selasa (15/5/2018).

AS harus bertanggung jawab atas seluruh peristiwa ini. Mereka berpesta di tengah hilangnya puluhan nyawa warga Palestina menuntut tanah mereka dikembalikan. AS telah berkontribusi dalam sejarah paling kelam dalam proses perdamaian di Timur Tengah.

Dalam peristiwa kemarin senin (14/5/2018) dikutip dari The Guardian setidaknya 55 warga Palestina telah tewas dan 2.400 lainnya terluka oleh pasukan Israel pada hari paling mematikan sejak perang Gaza 2014.

"Warga Palestina telah melakukan protes selama hampir enam minggu sebagai bagian dari protes 'hari nakba', tetapi peristiwa kemarin jumlah korban jiwa melonjak tajam bertepatan dengan hari ketika AS membuka Kedutaannya di Yerusalem. Sungguh sangat tragis dan ironis. PBB tidak bisa hanya berdiam diri, harus segera bertindak!" geram Rofi.

Legislator asal Jawa Timur ini menjelaskan, mayoritas dari mereka yang tewas adalah demonstran tidak bersenjata. Bahkan otoritas Palestina

Indonesian Lawmaker Accuses Israel of "Genocide" after Palestinian Protest
15-05-2018 / B.K.S.A.P.

Deputy Chairperson of the Committee for Inter-Parliamentary Cooperation of the House of Representatives of the Republic of Indonesia, Rofi Munawar, strongly condemned Israel for killing more than 55 Palestinians on the Israeli border, which occurred at the same day with the opening of the US Embassy in Jerusalem.

"Israeli soldiers open fire on Palestinian protesters brutally and blindly. It shows that Israel has committed 'genocide' and premeditated murder," Munawar said in a statement as quoted by *Parlemenaria* on 15 May 2018.

He added that US must be responsible for this. They are dancing on the death of Palestinians demanding the right to return to their land. According to Munawar, US has contributed in the darkest history of the Middle East peace process.

In the protest, as quoted by *The Guardian*, at least 55 Palestinian were killed and 2.400 others injured by Israeli forces in the deadliest day since the 2014 Gaza war.

"For the last six weeks, Palestinians have launched a protest as part of the 'nakba day' protest, but the death toll increased significantly on the same day as the opening of the US Embassy in Jerusalem. It is really tragic and ironic. The UN must not keep silent. Do something immediately!" Rofi said furiously.

The lawmaker from East Java constituency said that the majority of the victims were unarmed protesters. Palestinian authority in fact accused Israel of having committed a "horrible genocide" and called on international intervention to stop the killings.

Comment [AL1]: happened to coincide?

Comment [AL2]: I'm not too sure about this, but MAYBE 'as quoted from'? Do some research, please.

menuduh Israel melakukan "pembantaian yang mengerikan" dan menyerukan intervensi internasional untuk menghentikan pembunuhan. "Pemerintah Indonesia harus menyampaikan protes atas peristiwa tersebut dan mengambil peran aktif dalam mendorong tindakan tegas terhadap Israel yang telah melakukan pembantaian secara sistematis dan massif," pungkash Rofi. Lebih dari 1.200 warga Palestina ditembak dan terluka selama protes hari Senin. Menurut Kementerian Kesehatan Palestina, korban diantaranya enam anak-anak di bawah usia 18 tahun. Kematian termuda tampaknya adalah seorang anak laki-laki berusia 14 tahun bernama Ezzaldeen Al-Sammak. Sekitar 100 warga Palestina kini telah tewas di Gaza sejak para pengunjuk rasa memulai serangkaian pawai enam pekan lalu menuntut "Hak untuk Kembali" - hak bagi warga Palestina untuk kembali ke rumah nenek moyang mereka di tempat yang sekarang adalah Israel. (hs/sc)	"Indonesian government has to lodge a strong protest and take an active role to push tough action against Israel for having committed a systematic and massive massacre," Munawar said. More than 1.200 Palestinians were shot and wounded during the Monday protest. According to the Palestinian Health Ministry, among the victims were six children under the age of 18 years. The youngest victim was a 14-year-old boy Ezzaldeen Al-Sammak. Around 100 Palestinians have been killed in Gaza since the protesters started a six-week protest demanding "The Right to Return", a right for the Palestinians to return to their homeland where Israel is now occupying. (hs/sc/mut) EDITED BY MAS AJI
--	--

**Peresmian Kedutaan AS di Yerusalem
Dinilai Suburkan Terorisme**
15-05-2018 / B.K.S.A.P.

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf mengecam keras sikap Presiden AS Donald Trump yang bersikukuh meresmikan kedutaan besarnya di Yerusalem meskipun diwarnai kecaman masyarakat internasional.

"Dunia sebelumnya ramai-ramai mengecam rencana pemindahan Kedutaan AS pada Desember tahun lalu. Tapi yang kita lihat sekarang justru Trump melenggang meresmikan Kedutaan AS di Yerusalem. Ini jelas sinyal kuat sangat lemahnya dunia di hadapan Trump. Jika berdiam diri, saya khawatir sentimen anti-AS akan meluas dan tentu saja ini dapat memicu benih-benih terorisme," tegas Nurhayati dalam rilis yang diterima Parlemen, Selasa (15/5/2018).

Lebih lanjut, politisi F-Demokrat ini mengatakan dunia internasional telah gagal menghentikan kebijakan-kebijakan provokatif Trump. Dirinya juga mempertanyakan sikap Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai pihak yang paling bertanggung jawab, justru dinilai santai terhadap kebijakan Trump tersebut.

Menurutnya, jika PBB tidak bersikap tegas dan menentang kebijakan Donald Trump, maka sentimen anti-AS akan meluas dan dapat memicu tumbuhnya benih-benih terorisme.

"Protes ribuan rakyat Palestina atas langkah AS itu telah merenggut puluhan nyawa dan melukai ratusan lainnya. Penjajah Israel secara telanjang kembali melakukan pelanggaran HAM. Masa depan perdamaian akan semakin suram. Situasi kawasan akan terus bergejolak. PBB harus secepatnya turun tangan," seru Nurhayati.

**Inauguration-The Opening of US
Embassy in Jerusalem Triggers
Terrorism**

15-05-2018 / B.K.S.A.P.

The Chairperson of the Committee for Inter-Parliamentary Cooperation (BKSAP) of the Indonesian House of Representatives, Nurhayati Ali Assegaf, strongly criticizes and condemns Trump's obstinate decision to open the newly moved US Embassy in Jerusalem despite the wide-fierce criticism from the international community.

"The world has previously criticised Donald Trump's plan previously came under severe criticism from the world for his plan to move US Embassy from Tel Aviv to Jerusalem last December, but Trump-he insisted to continue with his plan and has just inaugurated the new Embassy in Jerusalem. It sends a clear message that Trump and his administration do not respect the international community. I am afraid if we don't take any serious action on this issue, it will only spread the anti-US sentiment and will trigger new seeds of terrorism," Nurhayati stated in a release sent to the Parlemen, Tuesday (5/15/2018)

Furthermore, this-the Democrat Party politician said that the international world have-had failed to cease-stop Trump's provocative policies. She was also wondering why the UN, as the most responsible actor, seemed undisturbed by this Trump's policy.

She thought, if the UN does-did not take force-any hard-stem measures and oppose Trump's policy, it would-would spread the anti-US sentiment and trigger the grow of new seeds of terrorism.

"The protest of thousands Palestinians has claimed tens of lives and injured hundreds of Palestinian people. A rally of thousands of Palestinian people protesting the US policy, ended causing tens of lives from the protesters and

Presiden International Humanitarian Law di Inter-Parliamentary Union (IPU) dan Presiden GCIAD (Geneva Council for International Affairs and Development) ini juga mendesak DK PBB segera menggelar pertemuan darurat untuk merespon kebijakan sembrono AS tersebut. Ia menambahkan, Pemerintah Indonesia sendiri telah mengecam keras kebijakan AS. Namun, kecaman saja tidak cukup. Karenanya, ia mendesak Kemenlu segera memanggil Duta Besar AS. "Saya apresiasi kecaman pemerintah kita. Tapi saya minta Duta Besar AS segera dipanggil dan sampaikan kepadanya nota protes keras. Pemerintah juga harus mendesak PBB melakukan penyelidikan atas tewasnya puluhan demonstran Palestina akhir-akhir ini. Kita adalah negara muslim terbesar. Kita harus ambil peran lebih maju," tegas politisi dapil Jatim V ini. Di sisi lain, DPR melalui BKSAP telah dan secara konsisten akan terus menyuarakan kepentingan Palestina di berbagai forum parlemen, seperti PUIC (Parliamentary Union of Islamic Countries) dan IPU (Inter-Parliamentary Union) agar segera mengambil langkah konkrit terhadap kebijakan AS itu. "Saya dan Delegasi DPR seperti di IPU (forum parlemen dunia) dan PUIC (forum parlemen negara-negara OKI) serta AIPA (forum parlemen ASEAN) konsisten mendukung perjuangan Palestina dan mengutuk tindakan brutal Israel. Bahkan di PUIC pernah saya kritik perpecahan negara-negara Arab sebagai faktor memburuknya situasi di Palestina. Saya pernah tegaskan bahwa persatuan negara-negara Arab dapat berkontribusi besar mewujudkan kemerdekaan Palestina," tandasnya. (ann/sc)	hundred others were injured. The occupiers, Israel, has once again abused the human rights. The future of peace looks dim." Said Nurhayati. Nurhayati, who is <u>also</u> the President of International Humanitarian Law of the Inter-Parliamentary Union (IPU) and also the President of Geneva Council for International Affairs and Development (GCIAD), urged the UN Security Council to immediately hold an urgent meeting to respond to that reckless US policy. She added, Indonesian Government has <u>sd</u> also <u>severely</u> criticized this US policy, but criticism alone <u>is-was</u> not enough. She urged the Ministry of Foreign Affairs to <u>call</u> <u>onsummon</u> the US Ambassador. "I <u>highly</u> appreciate the criticism from our government, but it has to be followed up by <u>calling-onsummoning</u> the US Ambassador and <u>handing-deliveringthem</u> a strong <u>protest</u> note <u>of-protest</u>. The government must also demand the UN to start an investigation on the death of tens of Palestinian protesters recently. We are a country with the biggest <u>Mmoslem</u> population. We must <u>take-play</u> a <u>further-leading</u> role." She said. <u>She further added</u> "On the other hand, the Indonesian House through <u>the Committee of Inter-Parliamentary Cooperation</u> (BKSAP) keeps voicing <u>out</u> the Palestine's interests in various <u>parliamentary</u> fora such as the Parliamentary Union of Islamic Countries (PUIC) <u>dan-and Inter-Parliamentary Union</u> (IPU) demanding <u>the-fora-to-take</u> concrete steps against the US Policy". "The delegation members of the Indonesian House and <u>in those forums and ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA)</u> are committed to supporting the struggle of Palestine and condemn the Israel brutal action. I once criticized <u>d</u> the Arab countries disunity as a factor that worsen the situation in Palestine. I once also stated firmly that the Unity of Arab countries could contribute significantly to the <u>f</u>Freedom of Palestine." She stated. (ann/sc/muiz) EDITED BY PAK BUDIMAN
---	---

Inisiasi Forum Parlemen Dunia, DPR Dorong Isu Energi Terbarukan 18-05-2018 / B.K.S.A.P. DPR RI melalui Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) kembali menggagas Forum Parlemen Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan (World Parliamentary Forum on Sustainable Development) untuk kedua kalinya pada 12 – 13 September 2018 mendatang. Sidang tersebut akan mengusung tema 'Kemitraan menuju Energi Berkelanjutan bagi Semua'. Ketua BKSAP DPR RI Nurhayati Ali Assegaf mengatakan, energi kerap kali menjadi isu sensitif bagi stabilitas dan keamanan global. Menurutnya, kebutuhan akan energi mempengaruhi setiap aspek kehidupan manusia serta produktivitas masyarakat untuk mendukung upaya global pemberantasan kemiskinan dan pembangunan. Namun, sangat disayangkan sumber-sumber energi konvensional masih menjadi kontributor utama terjadinya pemanasan global. Hal itu ia ungkapkan dalam Focus Group Discussion (FGD) persiapan penyelenggaraan The Second Parliamentary Forum on Sustainable Development bersama Deputy Bidang Kemaritiman dan SDA Bappenas Arifin Rudiyanto, Direktur Kerja Sama Ekonomi ASEAN Muhsin Syihab, Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan ESDM Harris, serta anggota BKSAP lainnya. "Karena itu, DPR kembali menginisiasi Forum Parlemen Dunia dengan tema energi terbarukan, saat ini dunia darurat memerlukan energi baru terbarukan (EBT) guna menjamin efisiensi dan sejalan dengan pertumbuhan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan," ungkap Nurhayati. Politisi Partai Demokrat ini memaparkan, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan harus ditempatkan sebagai tujuan	Initiating World Parliamentary Forum, The Indonesian House Promotes Renewable Energy Issues 18-05-2018 / B.K.S.A.P. The Committee for Inter-Parliamentary Cooperation (BKSAP) of the House of Representatives of the Republic of Indonesia re-initiated the World Parliamentary Forum on Sustainable Development (WPFSD) for the second time on 12 and 13 September 2018. The meeting will carry out the theme of 'Partnership toward Sustainable Energy for All'. Nurhayati Ali Assegaf, the chairperson of BKSAP said that energy is often a sensitive issue for global stability and security. The need for energy affects every aspect of human life as well as the productivity of society to support the global efforts to eradicate poverty and to promote development. Unfortunately however, conventional energy sources are still becoming the main contributor to global warming. This was revealed in the Focus Group Discussion (FGD) in preparation for the implementation of The Second Parliamentary Forum on Sustainable Development with Deputy of Marine Affairs and Natural Resources of the Ministry of National Development Planning Arifin Rudiyanto, Director of ASEAN Economic Cooperation Muhsin Syihab, Director of New Energy and Renewable Energy of the Ministry of Energy and Mineral Resources Harris, and other members of BKSAP. "Based on the case, the Parliament re-initiated the World Parliamentary Forum with the theme of renewable energy, since the world is currently in dire need of renewable energy to ensure efficiency and in line with environmentally sustainable growth," Assegaf said. The Democrat Party politician explained the Sustainable Development Goals
---	--

bersama. Parlemen sebagai institusi krusial memiliki peranan penting menentukan arah kebijakan pemerintah terkait perundangan, anggaran, pengawasan dan diplomasi luar negeri. Sisi lain, Parlemen juga secara langsung berinteraksi dengan masyarakat. "Karena itu, kemitraan global sangat penting bagi parlemen guna mensejahterakan masyarakat dunia serta menjaga kesinambungan bumi. Bagaimana ada kebijakan parlemen to parlemen terhadap kepentingan rakyat," jelasnya. Ia menambahkan, dengan kebijakan yang baik, pendanaan dan investasi yang memadai, energi terbarukan dan bersih akan lebih terjangkau dan mudah diakses. Mengingat, di Indonesia sendiri, masih ada 2500 desa yang belum teraliri listrik. "Di sinilah peran parlemen menjadi signifikan melalui pengawasan yang efektif atas kebijakan-kebijakan terkait energi dan pembentukan payung hukum yang mendukung pengembangan energi ramah lingkungan," imbuhnya. (ann/sf)	should be placed as a common goal. Parliament as a crucial institution has an important role in determining the direction of government policy related to legislation, budget, oversight, and foreign diplomacy. On the other hand, Parliament also directly interacts with the community. "Therefore, a global partnership is very important for the parliament to prosper the world community and maintain the sustainability of the earth. It is how to make a "parliament to parliament" policy towards the interests of the people," she explained. She added that with a good policy, adequate funding and investment, renewable and clean energy would be more affordable and accessible. Given that, in Indonesia alone, there are still 2500 villages that have not been powered by electricity. "This is where the parliament's role becomes significant through effective oversight of energy-related policies and the establishment of a legal protection that supports the development of environmentally friendly energy," she added. (ann/sf-chan) EDITED BY MBAK ICHA
---	---

**Pengibaran Bendera Israel di Papua
Nodai Perjuangan Diplomatik
Indonesia**

22-05-2018 / B.K.S.A.P.

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Rofi' Munawar meminta pihak keamanan dan pemerintah tegas dalam menindak pelaku aksi pawai komunitas Sion Kids of Papua yang mengibarkan bendera Israel di Jayapura, Papua, baru-baru ini. Menurutnya, pengibaran bendera Israel telah menodai perjuangan diplomatik Indonesia.

"Jika diperhatikan apa yang mereka lakukan sejatinya bukan sebuah peristiwa budaya dan agama, namun justru bentuk pengakuan eksistensi dan pengkultusan bendera Israel dari bangsa Yahudi. Ironisnya, dalam kegiatan tersebut tidak ada satupun bendera Indonesia, bukti bahwa mereka melanggar konstitusi," demikian disampaikan Rofi' dalam rilis yang diterima Parlemen, Senin (21/05/2018).

Rofi' menjelaskan, Indonesia memiliki tata aturan dalam penggunaan bendera asing yang secara nyata telah dilanggar Komunitas Sion Kids. Sisi lain, Pemerintah Indonesia tidak pernah memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Menurutnya, selama ini Indonesia dalam berbagai kebijakan negara dan sikap resmi senantiasa berkomitmen dalam mendukung kemerdekaan Palestina sebagai bagian dari misi diplomatik nasional.

Politisi F-PKS ini menambahkan, penggunaan bendera asing diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 1958 tentang Penggunaan Bendera Kebangsaan Asing. Bunyi Pasal 3 ayat (1) Apabila bendera kebangsaan asing digunakan, maka bendera itu harus digunakan bersama-sama dengan bendera kebangsaan Indonesia.

**Israeli Flag Raising in Papua
Tarnished Indonesia's Diplomatic
Struggle**

22-05-2018 / B.K.S.A.P.

Vice Chairman of the Committee for Inter-Parliamentary Cooperation (BKSAP) of the House of Representatives of the Republic of Indonesia, Rofi' Munawar, called on the security and government to take firm action against the actors of Sion Kids of Papua community parade that raised Israeli flag in Jayapura recently. The raising of Israeli flag had tarnished the diplomatic struggle of Indonesia, he said.

"If we look at the event incident carefully, it was-is not a cultural event or a religious event, but recognition of existence and cult of Israeli flag of the Jewish state. There was ironically no Indonesian flag at the event," Rofi' said in a statement received by Parlemen, Monday (21/5/2018).

He said Indonesia has its own regulation on flying flags of other nations that in this case had been violated by Sion Kids community. On the other hand, Indonesia and Israel do-did not have diplomatic relations. So far, in any state policy and official action Indonesia is-was always committed to supporting Palestine as independent state as parts of national diplomatic missions.

The Prosperous Justice Party politician added the raising of of the flags of other nations foreign flag is-was already regulated under government regulation (PP) No. 41/1958 on the use of the foreign flags-of-other-nations. It is-was stated on Article 3 Paragraph (1) that if the foreign flags-of-other-nations are displayed, they should be equally displayed together with the Indonesian flag.

"In addition to that, it is stated on Article 6 that the head of the local government may prohibit the use-of-the hoisting-the of

Formatted: Font: 11 pt, Highlight

"Selain itu, di pasal 6 disebutkan Kepala Daerah dapat melarang penggunaan bendera kebangsaan asing, apabila menurut pertimbangannya penggunaan itu dapat menyebabkan timbulnya gangguan ketertiban dan keamanan umum," tegas Rofi. Rofi' menilai kegiatan Sion Kids jika dicermati ternyata sudah sering dilakukan dan bukan pertama kali. Selain menggunakan bendera Israel, komunitas itu juga lakukan kegiatan yang membangga-banggakan bangsa Israel. "Sudah sepantasnya pemerintah daerah dan pihak keamanan tegas menindak. Terlebih kegiatan tersebut menurut keterangan polisi diikuti ada tokoh-tokoh dari DPRD Papua dan Aparatur Sipil Negara (ASN). Harusnya mereka paham dengan aturan," tandas Rofi. Sebagaimana diketahui, pawai pengibaran bendera Israel dengan mobil dan jalan kaki itu berlangsung di Jayapura, Papua, pada Senin 14 Mei 2018. Setidaknya ada dua video yang beredar terkait aksi pengibaran bendera Israel yang diduga dilakukan dalam acara Kebaktian Budaya Bangsa ke-12 di Gedung Olahraga (GOR) Waringin Kotaraja, Jayapura. (ann/sf)	foreign flags of other nations, if it is he considered that the display of the flag may to -cause civil unrest," he said. Rofi said the Sion Kids activity, if observed carefully, was carried out many times and that was not the first. Aside from flying hoisting the Israeli flag, the community also conducted other activities praising the people of Israel. "The local government and security forces should take firm action. It is especially because, according to police statement, the activity was attended by some members of the Papua Regional Legislative Assembly (DPRD) and state civil apparatus. They should have known about the law," he said. The Israeli flag raising parade in which people marched on cars and on foot occurred in Jayapura, Papua, May 14, 2018. At least there are were two videos went viral videos showing the Israeli flag raising activities allegedly carried out in the 12th Kebaktian Budaya Bangsa commemoration at Waringin Kotaraja sports hall, Jayapura. (ann/sf/mut) EDITED BY PAK BUDIMAN
--	---

Indonesia - Austria Ingin Kembangkan Kerja Sama 24-05-2018 / B.K.S.A.P. Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Juliari P. Batubara memimpin delegasi DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Austria guna meningkatkan neraca perdagangan bilateral kedua negara. Diharapkan, hubungan Indonesia – Austria yang sudah terjalin sejak 1954, baik dalam bidang politik maupun ekonomi semakin meningkat. Ari, panggilan akrab Juliari memaparkan, hubungan Indonesia dengan Austria sejak lama telah ditandai dengan peningkatan kunjungan di tingkat pemerintah dan parlemen. Dalam bidang politik, kedua negara saling mendukung dalam pencalonan wakil di badan PBB dan organisasi internasional lainnya. "Sebagai contoh, Austria mendukung pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB 2019-2020. Sebaliknya Indonesia juga mendukung pencalonan Austria sebagai anggota tidak tetap PBB 2027-2028," papar Juliari, di Wina, Austria, Selasa (22/5/2018). Kunjungan itu juga diikuti oleh Wakil Ketua BKSAP Rofi' Munawar serta 12 anggota BKSAP lainnya. Ari menambahkan, di bidang ekonomi, Indonesia mengekspor furnitur, kerajinan tangan dan bahan mentah. Sedangkan impor Indonesia dari Austria antara lain mesin dan suku cadang kendaraan, elektronik, produk olahan dan produk kimia. Sementara, di bidang pariwisata, ia juga menjelaskan situasi dan kondisi terkini dalam negeri terkait isu terorisme. Menurutnya, keamanan Indonesia tetap terkendali, sehingga aman untuk dikunjungi. Tak hanya itu, Ari juga membuka peluang kesempatan bisnis bagi sektor swasta di bidang Infrastruktur. Ia mengatakan, saat ini Indonesia sedang	Indonesia, Austria to Further Cooperation 24-05-2018 / B.K.S.A.P. Vice Chairman of the Committee for Inter-Parliamentary Cooperation (BKSAP) of the House of Representatives of the Republic of Indonesia, Juliari P. Batubara, led a delegation paying a working visit to Austria to improve bilateral trade balance between the two countries. The relation, established since 1954, was expected to boost economic and political cooperation. Batubara said the long term relationship between Indonesia and Austria was marked by the enhancing exchanging visits frequently within at the government and parliament levels. In the political cooperation, the two countries have supported each other for their candidacies in UN organs and other international organizations. "For example, Austria supported Indonesia's candidacy for non-permanent member of the UN Security Council non-permanent member for 2019-2020 period. In return, Indonesia supported Austria's candidacy for the non-permanent member of the UN Security Council for UN Security Council non-permanent member 2027-2028 period," Batubara said in WinaViena, Austria, Tuesday (22/5/2018). Rofi' Munawar, Vice Chairman of BKSAP, was also among the 12 visiting members of BKSAP. In the economic cooperation, Batubara added, Indonesia had exported furniture, handicrafts, and raw materials, while Indonesia imported machineries and auto spare parts, electronics, processed products, and chemical products. In tourism, he also explained the current domestic situation and condition relating to terrorism, saying that Indonesia's current situation was under control and was safe for tourists. In addition, Batubara said opportunities for private sector's investment is wide
---	--

giat membangun berbagai proyek infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, bandara serta pembangkit tenaga listrik, yang membutuhkan investasi yang besar. Selama di Austria, delegasi BKSAP melakukan kunjungan ke parlemen, Kementerian Transportasi, Inovasi dan Teknologi Austria dan kunjungan lapangan ke Siemens Mobility. Di pabrik seluas 14 ha itu, delegasi berkesempatan melihat langsung proses perakitan kereta dari rangka hingga menjadi barang jadi. Dalam kunjungan tersebut, Director of Sales Siemens Mobility Christoph Masopust mengatakan ingin berpartisipasi dalam pembangunan transportasi publik di Indonesia, terutama untuk transportasi massal kereta api. Menanggapi hal itu, Anggota BKSAP DPR RI Rachel Maryam mengatakan akan menindaklanjuti peluang kerja sama tersebut kepada pemerintah, sembari meminta Siemens memberikan harga yang kompetitif. Ia juga mengingatkan, agar kerjasama tersebut nantinya tidak menimbulkan masalah ketenagakerjaan di dalam negeri, seperti penggunaan tenaga kerja asing. Terkait hal ini, Masopust mengatakan pihaknya dapat bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan di antara kedua pihak, antara lain menyangkut finansial, tenaga kerja, maupun transfer teknologi. (ann/sf)	open private manufacturing sectors had the opportunity to begin a business. Indonesia, he added, was pushing infrastructure projects ranging from highways, ports, airports, to power plants, which need a large amount of huge investment. During their stay in the visit to Austria, BKSAP delegation paid visits to Austria's parliament, Ministry of Transportation, Innovation, and Technology, and Siemens Mobility. The delegation had the opportunity to observe the train assembly line from train body frame making to complete train form. During the visit, Director of Sales Siemens Mobility Christoph Masopust said his willing ness to participate in the transportation development in Indonesia, especially mass railway transportation. In response to that, Member of BKSAP Rachel Maryam said the House would pass on follow up the cooperation opportunity to Indonesian government, while asking Siemens to give competitive price. She also reminded that the cooperation would not cause any domestic employment problem, such as the influx of foreign labors. For this part, Masopust said Austria would negotiate to make a deal between the two countries, involving financial, labors, and technology transfer. (ann/sf/mut) <u>Atau</u> <u>For this part, Masopust said Austria was willing to negotiate to reach agreement on matters related to financial, labors, and technology transfer. (ann/sf)</u> EDITED BY PAK BUDIMAN
---	--

Menembak Mati Paramedis Razan, Israel Melanggar Hukum Internasional 05-06-2018 / B.K.S.A.P. Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Rofi Munawar menilai Israel telah melakukan tindakan pembunuhan berencana terhadap paramedis Palestina Razan Al Najjar. Mereka hingga saat ini terus melakukan pembunuhan terhadap warga Palestina dari beragam profesi dan latar belakang. "Israel ini seperti melakukan pembunuhan masal atas nama negara. Atas dalih mempertahankan diri, negara zionis itu membunuh siapapun yang ada di hadapan mereka. Anak-anak, ibu-ibu, wartawan hingga perawat," kata Rofi Munawar dalam keterangan pers yang disampaikan kepada media pada Selasa (05/6/2018) di Jakarta. Razan al-Najjar, perawat sukarela asal Palestina yang bertugas di Jalur Gaza, ditembak mati oleh tentara Israel pada hari Jumat (01/6/2018). Kematian Razan ini menambah daftar warga Palestina yang tewas oleh peluru Israel, menjadi 124 orang sejak akhir Maret lalu. Sejak 30 Maret 2018, warga di daerah Gaza melakukan protes di perbatasan Israel menuntut kembalinya tanah mereka setelah diusir dan melarikan diri selama perang pada 1948. "Protes yang dilakukan oleh warga Palestina dalam rangka memperingati hari nakba (tanah) di perbatasan Gaza dan pemindahan Dubes AS ke Yerusalem secara jelas dan nyata membuat Israel kalap dan gelap mata. Korban sudah banyak yang berjatuhan, namun kesekian kali dunia diam," kecam Anggota DPR RI dari Fraksi PKS. Legislator asal Jawa Timur ini menambahkan, Razan dalam peristiwa itu menggunakan atribut medis dan dalam posisi tidak melakukan perlawanan. Tapi tentara Israel tetap	Shooting Dead Paramedic Razan, Israel Violates International Law 05-06-2018 / B.K.S.A.P. Deputy Chairperson of the Committee for Inter-Parliamentary Cooperation (BKSAP) of the House of Representatives Rofi Munawar considered Israel to have committed a planned murder of the Palestinian paramedic Razan Al Najjar. They continued to kill the Palestinians from a variety of professions and backgrounds. "Israel is like carrying out a massacre on behalf of the state and on the pretext of self-defense, the Zionist state kills anyone who stands before them, children, mothers, journalists and nurses," Rofi Munawar said in a press release addressed to media on Tuesday (05/06/2018) in Jakarta. Razan al-Najjar, a Palestinian volunteer nurse in charge of the Gaza Strip, was shot dead by Israeli soldiers on Friday (01/06/2018). Razan's death adds to the list of Palestinians killed by Israeli bullets, a total of 124 by the end of March. Since March 30, 2018, residents in the Gaza Strip protested at the Israeli border demanding the return of their land after being expelled and fleeing during the war in 1948. "The protest by Palestinians to commemorate the nakba (land) day at the border of Gaza and the transfer of the US ambassador to Jerusalem has undoubtedly caused Israel to go berserk. Many victims have fallen, but the world remains silent for the countless time," slammed the member representative of the Prosperous Justice Party faction. The East Java legislator added that, Razan at the time wore medical attributes and was in a non-threatening position. And yet the Israeli army still fired shots at the 21-year-old woman. For the shooting, Israel should be punished severely for violating the 1949 Geneva Conventions.
--	---

saja melepaskan tembakan kepada wanita berusia 21 tahun tersebut. Atas penembakan itu, Israel sudah sepatasnya mendapatkan hukuman yang berat karena secara jelas telah melanggar Konvensi Jenewa Tahun 1949. "Dalam konvensi tersebut menegaskan bahwa paramedis mendapat perlindungan ketika berusaha menyelamatkan mereka yang terluka dalam konflik," ulasnya. Sebagai informasi, pengaturan mengenai perlindungan terhadap petugas kesehatan dalam medan perang dapat ditemui dalam pasal-pasal Konvensi Jenewa dan Protokol tambahannya. Misalnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 11, Pasal 24-27, Pasal 36, dan Pasal 37 Konvensi Jenewa maka petugas kesehatan harus dihormati dan dilindungi dalam segala keadaan. (hs/sc)	"The convention asserted that paramedics to be protected when trying to save those who are wounded in the conflict," he said. Stipulation on the protection of health workers in the battlefield can be found in the articles of the Geneva Conventions and their additional Protocols. For example, as provided for in Articles 11, 24-27, 36 and 37 of the Geneva Conventions, health workers shall be respected and protected in all circumstances. (hs/sc-chan) EDITED BY MAS AJI
--	---

DPR Tetap Dukung Reformasi Dewan HAM PBB 21-06-2018 / B.K.S.A.P.	DPR Committed to support the UN Human Right Council reform 21-06-2018 / B.K.S.A.P.	
Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Evita Nursanty menyayangkan keluarnya Amerika Serikat (AS) dari Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Padahal, Dewan HAM PBB merupakan sebuah forum kerja sama multilateral dan sekaligus bukti komitmen masyarakat internasional untuk menegakkan dan memajukan perlindungan HAM. Demikian disampaikan politisi PDI-Perjuangan ini, menanggapi keputusan keluarnya AS dari Dewan HAM PBB yang diumumkan Menteri Luar Negeri Michael Richard Pompeo dan Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley dalam konferensi pers Selasa sore waktu AS. "Indonesia tentu sangat meyakini keputusan AS ini, apalagi dasarnya hanya karena pembelaan mereka terhadap Israel dimana masyarakat dunia tentu masih memperdebatkan hal itu. Kita terus mendukung reformasi di Dewan HAM PBB dan juga badan PBB lainnya, tapi proses itu kan butuh dukungan, dan bukan dengan cara keluar," kata Evita dalam rilisnya, Rabu (20/6/2018). Menurutnya, peran Dewan HAM PBB penting karena menjadi harapan bagi masyarakat lemah di seluruh dunia untuk mendapat perhatian bagi perlindungan dari berbagai pelanggaran HAM. Dengan keluarnya AS, lanjut Evita, masyarakat dunia akan mempertanyakan kembali komitmen negara adidaya itu yang ingin disebut sebagai pemimpin global yang mempromosikan dan melindungi HAM semua orang di seluruh dunia, termasuk untuk perdamaian dan juga	Evita Nursanty, a Member of the Committee of Inter Parliamentary Cooperation of the Indonesian House of Representatives, was dissatisfied with US's decision to withdraw from the UN Human Right Council (UN HRC). She believed that the UN HRC served as a multilateral cooperation forum, as well as the international community's proof of commitment to uphold and advance human rights protection. This was stated following US' decision to withdraw from the Council as it was announced by the US State Secretary Michael Richard Pompeo and US Ambassador to UN Nikki Haley at a Press conference Monday afternoon local time. "Indonesia deeply regret US's decision to withdraw from HRC, particularly when it was just based on US' support of Israel, while the International Community are still debating over this issue. Indonesia keeps supporting the reform in the UN HRC and in other UN Agencies and believes that the process will need support from its member states by staying in the HRC," Evita said in a press release on 20 June 2018. She stated that the UN HRC is important for those weak community in all over the world to get protected from various human rights violations. With US withdrawing, she added, the international community will question the commitment of the super-power country, who wanted to be a global leader in promoting and protecting the human rights and peace as well as prosperity all over the world "Moreover, before its withdrawing, US administration has also withdrawn from	Comment [AL3]: It would be advisable to spell out the full name at the beginning of the article. In the following sentences, however, you can short it down to just 'Indonesian House'. Comment [AL4]: You can make it sound a bit more natural by saying something like, "Nursanty made her statement in response to..." Comment [AL5]: You can replace it by 'the country's' or 'their'. Comment [AL6]: See the different nuances it creates when you say, "Indonesia keeps supporting" versus when you say "Indonesia continues to support" Comment [AL7]: I think this slightly diverts the meaning. Perhaps you could translate it as, "...requires the support of its member states, not them bailing out on the organization," Comment [AL8]: the disenfranchised/marginalized? Comment [AL9]: It would stronger to say "to get the protection..." Comment [AL10]: Withdrawal (from the UN HRC)

kesejahteraan dunia. "Apalagi sebelum keluar dari Dewan HAM PBB, AS di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump juga sudah menyatakan keluar dari proses atau mekanisme multilateral antara lain dari Paris Agreement (Iklim), UNESCO, Global Compact Migration, Rencana Aksi Komprehensif Gabungan (JCPOA) soal nuklir Iran," ujarnya. Diakui Evita, kinerja Dewan HAM PBB memang belum sempurna. Namun, proses reformasi seperti yang dibutuhkan beberapa badan PBB lainnya, seperti Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB, justru membutuhkan komitmen politis dan semangat kerja sama multilateralisme dari anggota PBB. Karena itu, Evita mendukung langkah pemerintah Indonesia bersama-sama negara lainnya di dunia, untuk terus berkontribusi dan bekerja sama menegakkan dan memajukan perlindungan HAM, melalui kerja sama multilateralisme sesuai mandat Dewan HAM, termasuk memperkuat kinerja Dewan HAM PBB. "Kami mendukung Kementerian Luar Negeri RI untuk menegakkan dan mengembangkan perlindungan HAM melalui kerja sama multilateralisme dan memperkuat kinerja Dewan HAM PBB," kata politisi yang juga Anggota Komisi I DPR RI itu. (ann/sf)	other multilateral process or mechanisms such as the Paris Agreement, UNESCO, Global Compact Migration, the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) on the Iranian Nuclear deal," she added. She admitted, the UN HRC's performance has not been satisfying, but the reform process, as required of several other UN agencies such as UN Security Council and UN General Assembly, needs political and multilateral cooperation commitment from all UN member states. Therefore, she supports the step taken by the Indonesian Government along with other countries to continue contributing and cooperating in upholding and advancing the human rights protection, through multilateral cooperation, according to the mandate of the UN HRC, including strengthening the UN HRC performance. "We give our support to the Ministry of Foreign Affairs of Indonesia to uphold and promote the protection of human rights through multilateral cooperation and strengthening the UN HRC performance," she said. (ann/sf-muiz) EDITED BY MAS AJI
--	--

Comment [AL11]: You can substitute the use of a same word by other synonymous words/phrases. 'Needs' here can be replaced by 'calls for'.

Kejahatan Narkoba Lebih Berbahaya Dibanding Terorisme
21-06-2018 / B.K.S.A.P.

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf menyatakan bahwa perang melawan narkoba lebih berbahaya dibandingkan dengan perang melawan terorisme. Hal itu ditegaskannya saat pertemuan pertama AIPA Advisory Council on Dangerous Drugs (AIPACODD) yang berlangsung pada 18-21 Juni 2018 di Singapura.

"Kejahatan narkoba lebih berbahaya dari kejahatan teroris. Hal ini disebabkan karena korban jiwa yang semakin meningkat setiap harinya dan juga dapat merusak generasi muda dan kehancuran negara serta bangsa," tandas Nurhayati.

Didampingi dua anggota delegasi DPR RI lainnya, yaitu Fadel Muhammad (F-PG) dan Achmad Fariq (F-PPP), Nurhayati selaku Ketua Delegasi DPR RI menyerukan perang besar terhadap narkoba dan menuntut seluruh elemen yang ada di ASEAN untuk bergerak melawan kejahatan terorganisir yang bersifat lintas negara tersebut.

Dihadapan seluruh anggota delegasi yang hadir, Nurhayati menyampaikan tentang laporan kinerja (country report) Badan Narkotika Nasional (BNN) yang menyebutkan bahwa aparat penegak hukum Indonesia telah berhasil mengungkap kejahatan narkoba disertai barang bukti seperti Shabu (methamphetamine) 4,71 ton, Ganja (cannabis) 151,22 ton dan Ekstasi 2,940.748 butir dan 627,84 kilogram.

Hal ini merupakan bukti keseriusan aparat penegak hukum dalam melawan kejahatan narkoba dan komitmen hukum di Indonesia yang tegas dan keras terhadap jaringan sindikat narkoba.

"BNN juga melakukan pendekatan

Drugs More Deadly Than Terrorism
21-06-2018 / B.K.S.A.P.

War on drugs is much more serious than war on terrorism, claimed Chairperson of the Committee for Inter-Parliamentary Cooperation of the House of Representatives of the Republic of Indonesia, Nurhayati Ali Assegaf, at the 1st AIPA Advisory Council on Dangerous Drugs (AIPACODD) in Singapore, on 18-21 June 2018.

"Drug-related crime is more dangerous than terrorism as more people die from drugs each day. Drugs also imperil youth generation as well as country and nation," she said.

~~In~~ At the event, she was accompanied by two other delegation members, Fadel Muhammad (Golkar Party Faction) and Achmad Fariq (United Development Party Faction/PPP). As the head of delegation, she declared war on drugs and called on all ASEAN elements to combat the cross-border organized crime.

In front of the attendees, she delivered the National Anti-Narcotics Agency (BNN) report. It is stated in the report that the Indonesian law enforcement apparatus have successfully cracked down the drug-related crime, together with the collecting evidence such as of 4.71 tons of sabu-sabu (crystal methamphetamine), 151.22 tons of ganja (cannabis), and almost 3 million ecstasy pills.

Those efforts indicate that the Indonesian law enforcement apparatus was determined to fight against drug-related crime, and prove the law enforcers' commitment the law targeting for strict actions against drug syndicate network.

"BNN has introduced a demand reduction approach through some waysfeasible measures, as an effort to

Comment [AL12]: While omission of a known subject would typically be an effective way of delivering information, for the purpose of stressing the main title, I think it's important to repeat the word 'war' here.

Comment [AL13]: 'In the event' is an idiomatic expression meaning 'as it turned out'.

Comment [AL14]: It is quite common to mention the party's local abbreviation in international news piece like this.

Comment [AL15]: This is just my two cent.

Formatted: Font: 11 pt, Italic

Formatted: Font: 11 pt, Italic

Comment [AL16]: Either 'fight drug-related crime' or 'combat drug-related crime' but not 'fight against', OR if you want to go a bit dramatic, try 'start a war against drug-related crime'

demand reduction melalui langkah-langkah yang ditempuh, sebagai upaya untuk membentuk masyarakat yang mempunyai ketahanan dan kekebalan terhadap narkoba. Program dan kegiatan yang telah dilakukan dalam menekan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba dengan menasar kaum muda (anak-anak, remaja, pelajar dan mahasiswa) yang merupakan target pasar jaringan sindikat narkoba," papar Nurhayati. Terkait harapan ASEAN dibidang drug trafficking serta rehabilitation and prevention, Nurhayati berharap adanya komitmen, semangat, dan tekad yang kuat dalam mengatasi permasalahan yang tanpa batas itu. Memerangi narkoba sampai tuntas menjadi prioritas bersama. "Oleh karena itu dukungan seluruh anggota ASEAN sangat dibutuhkan dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan oleh masyarakat. Marilah berjuang bersama, bekerja sekuat tenaga, menjadikan negara kita bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba," imbuah politisi Fraksi Demokrat itu. AIPACODD sendiri merupakan transformasi dari AIPA Fact Finding Committee to Combat Drug Menace (AIFOCOM) dengan tujuan untuk mengambil tindakan konkret guna efisiensi dan koordinasi yang lebih baik terhadap ancaman narkoba di seluruh kawasan ASEAN dan juga untuk memperkuat peran dan mandatnya sebagai alat parlemen untuk memerangi ancaman narkoba. Pertemuan pertama AIPACODD di Singapura tersebut menghasilkan dua Resolusi yang akan diajukan untuk adopsi pada SIUM ke-39 AIPA yaitu Resolution on Securing A Drug-Free ASEAN Community for Future Generation dan Resolution on the Terms of Reference for the AIPACODD. Pertemuan kedua AIPACODD akan dilaksanakan tahun 2019 di Chiang Mai, Thailand. (dep/sf)	establish a persistent and immune community to drugs drug-free and drug-resilient community. They have also prepare initiated programs and events to diminish decrease the prevalence of drug abuse prevalence among youths (children, teens, pupils, and students) which are the vast main target market by of drug syndicate networks," she said. Regarding to ASEAN's hope in drug trafficking and rehabilitation and prevention, Nurhayati expects the commitment, spirit, and determination from all members to address the borderless problem. Our common priority is to completely fight against fully eradicate drug-related crimes. "So we need support from all the ASEAN members to do this job and carry out the people's mandate. Let's fight together, as hard as we can, to make sure that our countries are free from drug abuse and drug trafficking," she said. AIPACODD itself was-is a transformation of the AIPA Fact Finding Committee to Combat Drug Menace (AIFOCOM), which aims to make real steps for better efficiency and coordination to drug threat in the ASEAN region, and also to strengthen parliamentary role and mandate to beat the menace of drugs. The first AIPACODD meeting in Singapore brought about two resolutions to be adopted at the 39th SIUM-AIPA GA, namely Resolution on Securing a Drug-Free ASEAN Community for Future Generation and Resolution on the Terms of Reference for the AIPACODD. The second AIPACODD meeting will be held in 2019 in Chiang Mai, Thailand. (dep/sf-mut) EDITED BY MAS AJI
--	--

Comment [AL17]: 'Regarding something' or 'with regard to something'

Comment [AL18]: SIUM stands for sidang umum (General Assembly/GA)

Kemenangan Erdogan, Peluang Perkuat Diplomasi RI Untuk Palestina 28-06-2018 / B.K.S.A.P.	Erdogan Wins, Opportunity to Strengthen Indonesian Diplomacy For Palestine
Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Rofi' Munawar menilai terpilihnya kembali Recep Tayyip Erdogan sebagai Presiden Turki dapat semakin meneguhkan diplomasi Indonesia di tingkat internasional, khususnya terhadap persoalan Palestina. "Jika kita cermati sesungguhnya kebijakan Presiden Erdogan cukup banyak memiliki kesamaan pandangan dengan garis diplomasi Indonesia selama ini, khususnya terkait persoalan palestina. Tentu ini menjadi potensi yang sangat baik dalam mendorong peningkatan hubungan diantara kedua negara," kata Rofi' di sela-sela acara Asian Parliamentary Assembly (APA) di Cyprus, Rabu (27/6/2018). Politisi PKS ini berharap pemerintah lebih aktif dalam membangun hubungan dengan pemerintah Turki ke depan dalam sejumlah bidang. Terlebih saat ini negara tersebut cukup memiliki keunggulan dalam sektor pariwisata, teknologi dan industri. "Hubungan yang sudah baik selama ini harus dikembangkan ke arah yang lebih produktif bagi Indonesia. Pun dalam bidang diplomasi di level internasional mampu mendorong sejumlah agenda nasional Indonesia," tegas politisi dapil Jawa Timur itu. Untuk diketahui, Komisi Pemilihan Umum Turki secara resmi mengumumkan bahwa Erdogan memperoleh suara terbanyak dan akan memimpin Turki lima tahun mendatang. Dengan total 99 persen suara telah dihitung hingga kemarin, Erdogan memperoleh sebanyak 52,5 persen suara dibandingkan saingan terdekatnya, Muharrem Ince, yang mendapatkan 30,7 persen suara.	Vice chairperson of the Committee for Inter-Parliamentary Cooperation (BKSAP) of the Indonesian House of Representatives, Rofi' Munawar, stated that the re-election of Recep Tayyip Erdogan as President of Turkey can further strengthen Indonesia's diplomacy on the international level, especially on the issue of Palestine. "If you look at President Erdogan's policy, it has quite a lot of similarities with Indonesian diplomatic policy so far, especially regarding the issue of Palestine. Of course this is a very good potential in encouraging increased relations between the two countries," said Rofi' during the Asian Parliamentary Assembly (APA) session in Cyprus on Wednesday (27/06/2018). The Prosperous Justice Party faction (PKS) politician hoped the government would be more active in building relationship with the Turkish Government in some aspects in the future. Moreover, at this time those two countries have considerable advantages in the tourism, technology, and industry sector. "Relationship that have been good so far should be developed towards a more productive direction for Indonesia. Furthermore, at the international level, it is expected to push forward a number of Indonesia's national agenda," he said. The Turkish Election Commission officially announced that Erdogan had won the majority votes and would lead Turkey in the next five years. With a total of 99 percent of the votes counted until yesterday, Erdogan earned 52.5 percent of the vote against his closest rival, Muharrem Ince, who earned 30.7 percent of the vote. Meanwhile, the Erdogan Party, the Justice and Development Party (AKP),

Sementara itu, Partai asal Erdogan, Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP), juga mendapatkan 42,5 persen suara dalam pemilihan legislatif. Mereka akan membangun koalisi mayoritas bersama Partai Nasionalis (MHP) yang mendapatkan 11 persen. (ann/sf)	also received 42.5 percent of the vote in the legislative elections. They will form a majority coalition with the Nationalist Party (MHP) that received 11 percent of the votes. (ann/sf-chan) EDITED BY MAS AJI
---	---

Indonesia Dukung Timor Leste Jadi Anggota ASEAN

29-06-2018 / B.K.S.A.P.

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf mengatakan Indonesia mendukung penuh pencalonan Republik Demokratik Timor Leste sebagai Anggota Asosiasi Negara-negara se-Asia Tenggara (ASEAN).

Demikian diungkapkan Nurhayati usai mendampingi Ketua DPR RI Bambang Soesatyo dan Pimpinan DPR RI lainnya menerima kunjungan kenegaraan Presiden Republik Demokratik Timor Leste Francisco Guterres Lu Olo di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (29/6/2018).

"Indonesia selalu mendukung pencalonan Timor Leste ke ASEAN, sementara di tingkat legislatif kami juga berharap Parlemen Timor Leste bisa aktif di forum-forum antarpemerintah seperti AIPA dan IPU," papar Nurhayati yang juga menjabat sebagai Presiden International Humanitarian Law (IHL) itu.

Politisi Partai Demokrat ini lebih lanjut menuturkan, Indonesia akan selalu membuka diri terhadap Timor Leste, dengan adanya komitmen bersama untuk saling mendukung di tingkat eksekutif maupun legislatif. Termasuk hubungan kedua parlemen yang diharapkan semakin baik,

Sebagai bentuk dukungan Indonesia, lanjutnya, parlemen Indonesia turut mengundang parlemen Timor Leste agar hadir dalam Forum Parlemen Dunia ke-II yang akan diselenggarakan di Bali pada 12 – 13 September mendatang. Forum tersebut merupakan inisiasi DPR RI demi tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Presiden Guterres dalam kunjungannya menyampaikan ucapan selamat atas terpilihnya Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB

Indonesia Supports Timor Leste to Join ASEAN

Indonesia fully supports Democratic Republic of Timor-Leste in its bid to join the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), said ~~the Chairperson~~ of the Committee for Inter-Parliamentary Cooperation of the House of Representatives of the Republic of Indonesia (BKSAP DPR RI), Nurhayati Ali Assegaf, after accompanying the Speaker of the Indonesian House of Representatives, Bambang Soesatyo, ~~and other House leaders~~ She and other House Leaders received after hosting the state visit of the Timor Leste President Francisco Guterres Lu Olo, at the House complex, Senayan, Central Jakarta, on 29 June 2018.

"Indonesia will always support Timor Leste candidacy in ASEAN, while at the legislative level we also hope that Timor Leste-Parliament of Timor Leste to be more active in the inter-parliamentary forums such as AIPA and IPU," Assegaf, who is also the President of International Humanitarian Law (IHL), said.

The Democratic Party politician added that Indonesia ~~will~~ would always be open to Timor Leste, with a joint commitment to mutually support both at executive and legislative levels. Indonesia also hopes to work with Timor Leste to establish more cordial parliamentary relations.

The support, she said, ~~has~~ had been realized by inviting Parliament of Timor Leste to attend the World Parliamentary Forum on Sustainable Development, initiated by ~~the~~ The House, in Bali on 12-13 September 2018.

For his part, President Guterres congratulated Indonesia on its election as a non-permanent member of the UN Security Council for the 2019-2020 period, saying he always wanted to work hand in hand with Indonesia, its closest neighbor. He also hoped that Parliament

periode 2019-2020. Sebagai negara tetangga, ia juga menyatakan keinginannya untuk senantiasa bergandengan tangan dengan Indonesia. Bahkan dirinya menginginkan Parlemen Timor Leste bisa belajar serta bertukar pandangan dengan Parlemen Indonesia. Di pelbagai bidang kerja sama yang masih tertunda, Presiden Guterres optimis pemerintah Indonesia dan Timor Leste akan berjalan bersama serta mencari solusi yang tepat. Menurutnya, sebagai negara yang bertetangga, kedua negara tentu memahami apa yang menjadi kebutuhan bersama. (ann/sf)	<u>of</u> Timor Leste <u>parliament</u> could exchange views with Indonesian parliament. On some <u>delayed-pending matters in relation to areas of</u> cooperation, President Guterres voiced his optimism that Indonesia and Timor Leste would work together to find proper solutions. According to him, <u>as neighboring countries</u> both <u>countries have</u> certainly understood <u>each other since they have become good neighboring countries</u> <u>their mutual needs</u>. (ann/sf-mut) EDITED BY PAK BUDIMAN
---	--

14 Negara Pasifik Hadiri Forum IPPP 23-07-2018 / B.K.S.A.P. Sebanyak 14 negara di Kawasan Pasifik menghadiri forum Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) on Human Development and Maritime Sustainability yang digelar di Jakarta, Senin-Selasa (23-24/7/2018). Pertemuan ini merupakan forum kemitraan parlemen baru antara Indonesia dan negara-negara kepulauan di Samudera Pasifik. Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf mengatakan, IPPP merupakan inisiatif DPR RI dalam mencari terobosan baru untuk mengembangkan kerja sama kemitraan di berbagai bidang, khususnya ekonomi, dengan negara-negara di Kawasan Pasifik. "Agenda IPPP ini untuk mempererat hubungan diplomasi antara Parlemen Indonesia dengan parlemen negara-negara Pasifik. Alhamdulillah, dari 16 negara ada 14 negara yang hadir dan 9 Ketua DPR," ungkap Nurhayati, usai gala dinner sebagai simbol penyambutan kepada seluruh delegasi, di Jakarta, Minggu (22/7/2018) malam. Ke-14 negara tersebut adalah Cook Islands, Micronesia, Fiji, Kiribati, Nauru, Republik Palau, Papua Nugini, Marshall Islands, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu, Polynesia dan Kaledonia Baru. Politisi Partai Demokrat ini menuturkan, sidang yang mengangkat tema tentang pembangunan sumber daya manusia dan keberlanjutan maritim ini merupakan momentum bersejarah karena pertama kalinya bagi Indonesia dan negara-negara pasifik saling bertemu guna mempererat konektivitas. "Tadi sudah dilakukan beberapa pertemuan bilateral. Mereka mengatakan sangat berterima kasih atas keramatahman masyarakat Indonesia.	14 Pacific Island Nations Participate Gartner in IPPP Forum, to Promoteing Cooperation Fourteen island nations in the Pacific region participated in Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) on Human Development and Maritime Sustainability in Jakarta, on 23-24 July 2018. It is a new parliamentary partnership forum proposed by Indonesia and the Pacific island nations. Nurhayati Ali Assegaf, Chairperson of the Committee for Inter-Parliamentary Cooperation of the Indonesian House of Representatives of the Republic of Indonesia (BKSAP), said stated that IPPP is an initiative from the Indonesian House of Representatives to seek a new breakthrough to boost cooperation partnership in some areas, particularly economy, with nations in the Pacific region. "IPPP is held to strengthen diplomatic relations between Indonesian Parliament and Pacific island nations". Thanks God, out of 16 nations, 14 nations, including and 9 speakers, are attending (the forum)," Nurhayati said, after a welcome dinner for delegates on 22 July 2018. These 14 countries are Cook Islands, Micronesia, Fiji, Kiribati, Nauru, Republic of Palau, Papua New Guinea, Marshall Islands, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu, Polynesia, dan New Caledonia. The Democratic Party politician said the forum, under the theme of a human resources development and maritime sustainability, was a historic event because it is the first time Indonesia and Pacific island nations met to tighten connectivity. "We have just held several bilateral meetings. They express their gratitude for Indonesian people hospitality. All of us agree on strengthening relations," Nurhayati said.
---	---

Kita semua sepakat hubungan yang sudah dekat ini perlu ditingkatkan lagi," papar Nurhayati.

Di sisi lain ia menambahkan, melalui forum ini diharapkan negara-negara Pasifik dapat mengenal lebih jauh budaya serta karakteristik bangsa Indonesia yang begitu beragam. Sama seperti negara Pasifik, Indonesia juga memiliki masyarakat yang berasal dari rumpun Melanesia dan Polynesia.

"Hal-hal seperti ini perlu juga kita kenalkan supaya mereka memahami bahwa inilah Indonesia. Kita adalah negara kesatuan republik yang berdaulat dan tidak pernah membedakan suku maupun etnis. Itu kita tekankan dan mereka sangat terbuka, bisa dirasakan dari welcome dinner malam ini. Mereka begitu menyatu dan merasa berada di daerah mereka sendiri," tandas Nurhayati. (ann/sf)

She added ~~that the~~ Pacific island nations could explore ~~the~~ Indonesian cultural diversity in this forum. Like many Pacific island nations, some Indonesians are also Melanesian and Polynesian. Indonesia is inhabited by Melanesian and Polynesian people.

"We need to introduce those things in order that they understand, ~~that~~ this is Indonesia. We are a sovereign unitary republic ~~the Unitary State of the Republic of Indonesia~~ and never discriminate people based on their tribes and ethnicities. That is what we are stressing and they are very open (to the idea), and we can feel it ~~It can be felt~~ at the welcome dinner tonight. They are blended into one ~~feel united~~ and feel like home here," Nurhayati said. (ann/sf-mut)

EDITED BY MAS NOVRI

Indonesian House Enhance Partnership with Pacific Region 23-07-2018 / B.K.S.A.P. Vice Chairperson of the Committee for Inter-Parliamentary Cooperation (BKSA-P) of the Indonesian House of Representatives, Juliant Batubara, confirmed that the House will continue to enhance partnership with several countries in the Pacific Region. It is important to increase various feasible potentials, such as blue economy, human development, and sustainable biodiversity. Batubara said that the Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) event held in Jakarta, July 23-24, 2018, was aimed to strengthen the relationship between Indonesia and Pacific Region countries, which is something that has not been fully pursued. "Through this IPPP event, we hope that there will be closer partnership between Indonesia and Pacific. So far, the cooperation with the Pacific countries is less of a concern," said Batubara during of the IPPP forum in Jakarta, Monday (23/07/2018). The Indonesian Democratic Party of Struggle politician said this forum play a role to promote partnership between parliaments, not only diplomatic but also economic partnership. Another aspect, Batubara also requested the Pacific countries to support the sovereignty of Papua as part of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI), because global issues related to Papua can be resolved regionally. "Papua is a part of NKRI, and of course it is part of our concern to continue and gain support for the sovereignty of Papua as part of NKRI and this cannot be separated from the partnership relation with Pacific countries," Batubara added. In this connection, the Member of	DPR Akan Tingkatkan Kerjasama dengan Kawasan Pasifik 23-07-2018 / B.K.S.A.P. Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSA-P) DPR RI Juliant Batubara menegaskan DPR akan terus meningkatkan kerjasama dengan Perwakilan negara di Kawasan Pasifik. Hal ini penting untuk meningkatkan berbagai potensi yang bisa dimanfaatkan, seperti blue economic, pembangunan manusia dan menjaga keanekaragaman hayati. Juliant menuturkan kegiatan Indonesia - Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) yang digelar di Jakarta, 23-24 Juli 2018 ini bertujuan untuk mendekatkan hubungan Indonesia dengan negara Kawasan Pasifik yang selama ini belum terjalin secara akrab. "Melalui kegiatan IPPP ini, kita berharap adanya kerjasama yang lebih akrab antara Indonesia dengan Pasifik. Selama ini memang kerja sama antara negara Pasifik tidak terlalu digarap," ungkap Juliant di sela-sela forum IPPP di Jakarta, Senin (23/7/2018). Politisi PDI-Perjuangan ini menuturkan bahwa pertemuan ini berperan guna meningkatkan kualitas kerjasama antar parlemen, tidak saja diplomatis tapi juga kerjasama di bidang ekonomi. Hal lain, lanjut Juliant juga meminta agar negara Pasifik turut berperan dalam menjaga kedaulatan Papua sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karena isu-isu global terkait Papua bisa diselesaikan secara regional. "Papua sebagai wilayah NKRI tentunya kita berkepentingan untuk terus dan selalu dapat dukungan atas kedaulatan Papua sebagai bagian dari NKRI dan ini tidak lepas dari hubungan kerjasama dengan negara Pasifik," jelas Juliant.
--	--

Sehingga, tambah politisi yang juga Anggota Komisi VI DPR RI itu, hubungan Indonesia dengan negara Kawasan Pasifik harus dilakukan secara berkelanjutan. Samudera Pasifik bukan lagi menjadi pemisah antara Indonesia dengan negara Kawasan Pasifik, tetapi telah berhasil sebagai medium yang menyatukan agar ke depan terjalin hubungan erat. (hs/sf)	Commission VI (trade, industry, investment) of the Indonesian House of Representatives added that Indonesia's relations with Pacific Region countries should be sustainable. The Pacific Ocean is no longer a separator between Indonesia and the Pacific countries. It has turned into a unifying medium for strengthened relationship in the future. (hs / sf/chan) EDITED BY MBAK ICHA
--	--

Kemitraan Indonesia – Pasifik Perkuat Dukungan Internasional
23-07-2018 / B.K.S.A.P.

Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Bara Krishna Hasibuan menilai 14 negara yang hadir pada Indonesia - Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) memiliki peran penting sebagai kekuatan pendukung Indonesia di forum internasional.

"Walaupun mereka negara kecil, suara mereka tetap didengar dunia internasional, sehingga kita tetap perlu menjalin kerja sama. Mereka bisa menjadi kekuatan lobbying," kata Bara usai sesi pembukaan IPPP di Jakarta, Senin (23/7/2018). IPPP dibuka langsung oleh Ketua DPR RI Bambang Soesatyo.

Sebagai negara kepulauan terbesar dan berada di persimpangan dua samudera, Indonesia memiliki berbagai potensi isu lingkungan dan konflik yang dapat mengancam kedaulatan wilayah. Salah satunya persoalan Papua. Untuk itu, pada kesempatan ini DPR RI akan melakukan pendekatan kepada negara-negara tersebut, untuk menjelaskan bahwa Papua sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI.

"Ini isunya sangat sensitif. Artinya kita memerlukan dukungan internasional sebanyak mungkin terutama negara-negara di Pasifik terhadap teritorial integritas dari Indonesia. Dan memang di antara mereka ada yang memberikan dukungan secara terbuka terhadap pemberitaan Papua. Kita harus aktif untuk mencegah dan tentu saja itu kita harus aktif untuk melawan itu," tandas politisi F-PAN ini.

Menurut Bara, forum IPPP merupakan pertemuan yang sangat strategis. Mengingat seluruh negaranya merupakan negara kepulauan, sehingga memiliki permasalahan dan visi yang sama untuk menyelesaikannya.

Indonesia – Pacific Cooperation: Enhancing International Support
23-07-2018 / B.K.S.A.P.

Bara Krishna Hasibuan, Member of the Committee for Inter-Parliamentary Cooperation (BKSAP) of the Indonesian House of Representatives, believed the 14 pacific countries participated in the Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) have a significant role to support Indonesia in international fora.

"While they are relatively small countries, their voices are as significant as other countries in the world. Therefore, it is important that we cooperate with those countries. They can be our lobbying powers," said Hasibuan after the opening session of the IPPP in Jakarta, Monday (23/7/2018). The IPPP was opened by the Speaker of the Indonesian House, H.E. Bambang Soesatyo.

As the biggest archipelagic country intersecting two oceans, Indonesia has various potential environmental issues and conflicts which could threaten its territorial sovereignty, i.e., the (West) Papua issue. Therefore, in this very occasion, the Indonesian House explained to the Pacific Countries that Papua was an integral part of the Republic of Indonesia.

"This issue is very sensitive. It requires us to have as much international support as possible, especially from the Pacific Countries to the territorial integrity of Indonesia, for it is widely known there are certain countries among them who openly support the West Papua (Movement). We must be proactive to avert and to counter it," affirmed Hasibuan.

According to Hasibuan, the IPPP was a strategic forum considering that all

Comment [AL19]: I don't think this is the suitable expression for a news piece. It almost sounds like something you read from a speech. Alternatively, however, you can say something like, 'the Indonesian House used this platform to...'

Comment [AL20]: Unnatural, perhaps: This is a very sensitive issue.

Comment [AL21]: I notice this is part of the source text, but as it's translated, it creates an ambiguous sentence. Therefore, I think it's best to just leave the word out since the meaning is quite clear.

Di samping untuk memberikan keyakinan bahwa Papua bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI, politisi dapil Sulawesi Utara ini menambahkan, agenda pertemuan ini menekankan kepada isu-isu lingkungan hidup seperti perubahan iklim, maritim, dan blue economy. "Mengingat laut memegang peranan penting di dalam kelestarian hidup. Melalui forum ini Indonesia – Pasifik akan berkontribusi untuk mengurangi isu-isu di kawasan Pasifik," tandas politisi yang juga Anggota Komisi VII DPR RI itu. (apr/sf)	the participants were archipelagic countries, so they had common issues, and the visions to solve them. In addition to asserting that (West) Papua was an integral part of the Indonesian Territory, he added that this meeting also pointed out on environmental issues; they were Climate Change, Maritime affairs, and BlueEconomy. "Considering the important role of ocean for our life sustainability, through this forum Indonesia – Pacific will contribute to minimizing the challenging issues in the Pacific region," he said. (apr/sf-muiz) EDITED BY MAS AJI	Comment [AL22]: I think to 'point out' means to point at something, like literally. Maybe you can use 'highlighted' instead (without 'on'). Comment [AL23]: Alternatively, you can also say 'namely...' Comment [AL24]: Missing information. Comment [AL25]: Another missing information on the source's background info as a committee member.
---	--	---

Fadel dan Hasrul Jabat Pimpinan BKSAP

25-07-2018 / B.K.S.A.P.

Dua pimpinan baru kini mengisi kursi Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI yang kosong. Keduanya diisi Fadel Muhammad dari Fraksi Partai Golkar dan Hasrul Azwar dari Fraksi PPP. Keduanya dilantik langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, dan disaksikan Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf dan Wakil Ketua BKSAP Rofi' Munawar.

Usai membacakan keputusan Pimpinan DPR RI soal pergantian Pimpinan BKSAP di ruang rapat BKSAP, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (25/7/2018), Fadli secara simbolik menyerahkan palu rapat kepada kedua pimpinan BKSAP yang baru.

Fadli mengungkapkan, Fadel Muhammad menggantikan Siti Hediati Soeharto yang sudah mengundurkan diri dari DPR RI dan berpindah partai politik. Sementara Hasrul Azwar menggantikan Nurhayati Monoarfa yang beberapa waktu lalu sudah dilantik menjadi Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI.

Dalam sambutannya, politisi Partai Gerindra itu berharap, dengan pergantian dua pimpinan BKSAP ini, kelak BKSAP bisa bergerak aktif kembali menjalin kerja sama dengan parlemen-parlemen dunia. Dia menambahkan, BKSAP harus mampu memberi kontribusi nyata dalam berbagai pertemuan parlemen maupun organisasi dunia.

"Kita harapkan BKSAP sesuai tupoksinya bisa menjadi alat kelengkapan dewan yang melaksanakan tugas untuk mengembangkan, membina, dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPR RI dengan parlemen negara lain," ucapnya.

Fadel and Hasrul Elected New BKSAP Leaders

25-07-2018 / B.K.S.A.P.

Fadel Muhammad from Golkar Party Faction ~~dan~~ and Hasrul Azwar from United Development Party (PPP) Faction have been elected the new Deputy Chairpersons of the Committee for Inter-Parliamentary Cooperation (BKSAP). They were inaugurated by Fadli Zon, Vice Speaker of the Indonesian House, witnessed by Chairperson of BKSAP Nurhayati Ali Assegaf and her deputy Rofi' Munawar.

After reading the House leaders' decree on the ~~change of BKSAP leadership~~ ~~change in the BKSAP~~ at the BKSAP's meeting room, ~~at~~ the House complex, ~~in~~ Senayan, Central Jakarta, 25 ~~july~~ July 2018, Fadli symbolically handed over the gavel to the newly elected BKSAP leaders.

Fadli said Fadel Muhammad replaced Siti Hediati Soeharto ~~(a former Golkar Party Politician) who quitted-resigned from the legislative body after joining and joined another Berkarya Pparty~~, while Hasrul Azwar replaced Nurhayati Monoarfa who has recently been appointed Deputy Chairperson of the Household Committee.

Addressing during the event, the Gerindra Party politician hoped through the leadership change, BKSAP would be more active in establishing cooperation with other parliaments in the world. He added that BKSAP had to give real contributions in any parliamentary and world organization meetings.

"We are expecting BKSAP as a complementary body to develop, nurture, and ~~further promote~~ friendly relations and cooperation between DPR RI and other parliaments," he said.

For her part, Nurhayati called on BKSAP to do the best job possible to fulfill that mandate. "With the additional number of

Sementara itu, Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf dalam sambutannya juga menyerukan, sesuai tupoksinya BKSAP bisa menjalankan amanah dengan baik. "Dengan bertambahnya pimpinan, kita bisa lebih sempurna lagi menjalankan amanah untuk kepentingan rakyat Indonesia," tutup Nurhayati. (mh/sf)	leaders, we could be more impeccable in fulfilling the mandate for the good of Indonesian people," she said. (mh/sf-mut) EDITED BY MBAK ICHA
---	---

WPFSD Ke-2 Angkat Isu Energi Berkelanjutan 25-07-2018 / B.K.S.A.P. DPR RI melalui Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) kembali menggagas Forum Parlemen Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan atau World Parliamentary Forum on Sustainable Development (WPFSD). Forum ini merupakan inisiasi kedua DPR RI untuk merangkul parlemen negara sahabat bersama-sama membahas isu global, termasuk agenda 2030. Forum yang digelar untuk kedua kalinya ini mengangkat tema "Partnership Towards Sustainable Energi for All", dan akan diselenggarakan di Bali pada 12-13 September 2018 mendatang. "Forum ini diselenggarakan DPR RI sebagai forum yang kedua kalinya dan akan mengundang puluhan negara untuk membicarakan tentang SDGs terutama goal ke-7 terkait penyediaan energi bersih dan terbarukan," kata Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dalam Embassy Briefing di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (25/7/2018). Fadli menjelaskan ketahanan energi sangat vital dan penting bagi masyarakat global, karena itu dibutuhkan kebijakan energi yang berkelanjutan. Mengingat, 70 persen kebutuhan energi global masih pasok oleh energi fosil, seperti minyak, gas dan batu bara yang jumlahnya semakin lama semakin terbatas. "Kita tidak mungkin hidup tanpa energi yang sustainable. Karena itu kita berharap terjadi diskusi dan dialog yang konstruktif dalam forum tersebut," terang Wakil Ketua Koordinator Bidang Politik dan Keamanan ini. Politisi Partai Gerindra itu menambahkan, dalam hal ini parlemen sebagai perwakilan rakyat memiliki peranan penting untuk menentukan arah kebijakan pemerintah melalui	2nd WPFSD Proposes Sustainable Energy Issue 25-07-2018 / B.K.S.A.P. The House of Representatives of the Republic of Indonesia (DPR RI), through the Committee for Inter-Parliamentary Cooperation (BKSAP), is initiating the World Parliamentary Forum on Sustainable Development (WPFSD). This is DPR's second initiative to embrace parliaments of friendly countries' to exchange views on global issues, including the 2030 agenda. The main theme of the forum, which will be held in Bali on 12-13 September 2018, would be "Partnership Towards Sustainable Energy for All". "We invited tens of countries to participate in the event to discuss the idea of SDGs, especially the seventh goal on ensuring access to renewable and clean energy," said Vice Speaker Fadli Zonduring Embassy Briefing at the House complex in Senayan, Central Jakarta, on 25 July 2018. He said that reliable energy is very vital and essential to billions of people around the world, and we need a sustainable energy policy. Given that 70 percent of global energy needs are still supplied by fossil energy, such as oil, natural gas, and coal that number is increasingly limited. "We cannot live without sustainable energy. Therefore, we are expecting a constructive dialogue in the forum," said the Vice Speaker for Politics and Security. The Gerindra Party politician added that DPR as a representation of the people, has a key role in shaping the government policies through laws and budgeting function. Hence, supports from parliaments are needed to urge governments of respective countries to be more concerned about the energy sector.
---	---

Comment [U26]: Pake simple past
ajakrnatanggalspesifiknyakapan FZ
sampaikankalimatnya

Comment [U27]: Discuss gaperlu
preposition lg

Comment [U28]: Kalimat km
udahbagus& concise sih Mutt,
tpkurangumumajautkpembaca Indonesia
yg coba2 bacaversi English drberitaini.
Jadigwubahkekalimat literal aja.

perundang-undangan dan hak anggaran. Karenanya, dukungan dan peran parlemen untuk mendorong pemerintah masing-masing negara lebih peduli terhadap sektor energi. Hal senada disampaikan Ketua BKSAP DPR RI Nurhayati Ali Assegaf. Ia menuturkan, energi kerap kali menjadi isu sensitif bagi stabilitas dan keamanan global. Menurutnya, kebutuhan akan energi mempengaruhi setiap aspek kehidupan manusia serta produktivitas masyarakat global. "Seperti kita ketahui, pertumbuhan ekonomi kita selalu terganggu dengan naik turunnya harga minyak mentah dunia, sehingga kita harus memfokuskan bahwa energi berkelanjutan menjadi prioritas bersama," jelas Nurhayati. Politisi Partai Demokrat itu melanjutkan, ketahanan energi dan energi terbarukan juga sejalan dengan goal nomor 7 dalam Sustainable Development Goals (SDGs), yang mana tujuan ini dicanangkan untuk memastikan akses energi yang terjangkau, berkelanjutan dan modern bagi seluruh masyarakat. (ann/sf)	Nurhayati Ali Assegaf, Chairperson of the BKSAP, echoed that statement. She said energy often became a sensitive issue in the global stability and security. Energy, according to her, would be affecting every aspect of human life and productivity around the world. "As we know, our economic growth is always influenced by world oil price fluctuation thus we have to put a high priority over the sustainable energy," she said. The Democratic Party politician added that reliable and renewable energy is in line with the goal number 7 of the SDGs aimed at ensuring access to affordable, sustainable, and modern energy for all human beings. (ann/sf-mut) EDITED BY MBAK ICHA
---	--

**GKSB DPR RI Terima Kunjungan
Wakil Duta Besar Jepang**
31-07-2018 / B.K.S.A.P.

Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menerima kunjungan Wakil Duta Besar Kekaisaran Jepang untuk Indonesia Minister Keiichi Ono. Kunjungan tersebut langsung diterima oleh Ketua GKSB DPR RI-Parlemen Jepang Aryo P.S Djojohadikusumo di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (31/7/2018).

"Beliau memulai tugas yang baru di Indonesia untuk membantu mempererat hubungan diplomatik antara Indonesia dan Jepang. Apalagi tahun ini adalah peringatan 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Jepang sejak tahun 1958," terang Aryo saat ditemui oleh Parlemen usai pertemuan.

Politisi Partai Gerindra ini menjelaskan sudah banyak kerja sama yang dilakukan dalam rangka menjaga dan mempererat hubungan baik antara Indonesia dengan Jepang. Ia mencontohkan salah satunya yaitu kerja sama memberantas perdagangan manusia.

"Nanti kita juga ada World Parliamentary Forum di Bali tanggal 12-13 September mendatang. Salah satu agenda dari forum tersebut adalah untuk mewujudkan pertumbuhan sosial ekonomi berkelanjutan antar dua negara ini. Dan banyak lagi yang kita perjuangkan, semoga saja itu berjalan dengan baik," papar Aryo.

Melihat kondisi global saat ini, dimana terjadi perang dagang antara Amerika dengan China, kemudian Inggris keluar dari Uni Eropa, Aryo berharap hubungan diplomasi kedua negara tetap utuh dan berjalan dengan baik, serta tercipta win-win solution terhadap perkembangan Indonesia dengan Jepang.

GKSB Welcomes Meet with Keiichi Ono, to Pursuing Improved Ties

~~Bilateral Cooperation~~ The Indonesian House' Parliamentary Friendship Group (GKSB) of the Committee for Inter-Parliamentary Cooperation (BKSAP) warmly welcomed Keiichi Ono, Japanese Deputy Ambassador to Indonesia. Aryo P.S Djojohadikusumo, Chairman of Indonesian - Japan House of Representatives' GKSB-Japanese Parliamentary Friendship Group, hosted the welcome reception the delegation at the House complex Building, Senayan, Central Jakarta, on 31 July 2018.

"He has just started his new job assignment in Indonesia to build a closer diplomatic relation between Indonesia and Japan. This year marks the 60th anniversary of the establishment of diplomatic ties between the two countries since 1958," said Djojohadikusumo Aryo, said after the meeting.

The Gerindra lawmaker said both countries have been working together in many areas in order to maintain and cement such a cordial the existing close relation. He mentioned a cooperation it is, for instance, implemented in the form of rooting out human trafficking as one example.

"We will also hold World Parliamentary Forum in Bali on 12-13 September 2018. One of the agenda is to create a sustainable socio-economic development between the two countries. And there are more to strive for. We will also be working on many more plans, which we hope will bring success," Djojohadikusumo Aryo said.

Noting the fact that in the current global situation where the USA and China are engaging in a trade war, while the UK wants to leave the European Union (EU), Djojohadikusumo Aryo hopes that both diplomatic ties remain intact and smooth, and bring a win-win solution for Japan and Indonesia.

Pada kesempatan yang sama, Aryo juga menerima informasi langsung dari minister Ono bahwasanya Pemerintah Jepang akan mengirim lebih dari 1000 atlet yang akan berlaga di Asian Games 2018. Dimana Indonesia akan menjadi tuan rumah perhelatan olahraga terbesar se-Asia ini. "Itu merupakan delegasi yang sangat besar, mengingat mereka juga sedang dalam persiapan untuk menjadi tuan rumah Olimpiade di Tokyo tahun 2020, tuan rumah Piala Dunia Rugby tahun 2019, serta bersama-sama menjadi tuan rumah Piala Dunia Basket tahun 2023 di Indonesia, Jepang dan Filipina. (es/sf)	During the meeting, Djojohadikusumo Aryo also recieved was informed edation from by Ono that Japanese Government would send more than 1,000 athletes to the biggest sport event in Asia—Asian Games 2018 in Jakarta-Palembang. "That's a very large delegation, considering they are also preparing to host the 2020 Summer Olympics in Tokyo, the 2019 Rugby World Cup, and together with Indonesia and the Philippines co-host the 2023 FIBA Basketball World Cup". (es/sf-mut) EDITED BY MAS NOVRI
---	--

Energi Terbarukan Menjadi Perhatian Serius WPFSD 2018 12-09-2018 / B.K.S.A.P. Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf mengungkapkan, forum World Parliamentary Forum on Sustainable Development (WPFSD) ke-2, akan memberikan perhatian serius pada persoalan energi terbarukan. Forum internasional yang digelar di Bali ini dihadiri oleh perwakilan dari parlemen yang berasal dari 45 negara. "Kesulitan bagi negara emerging country seperti Indonesia ini semuanya bergantung pada harga minyak. Ekonomi global sangat bergantung pada harga minyak. Kita mulai bicarakan bagaimana sustainable energy," jelas Nurhayati di sela-sela menerima kedatangan perwakilan parlemen di Bali, Selasa (11/9/2018) malam. la mengungkapkan saat ini parlemen dunia sudah mulai mendorong pemerintah agar kebijakan pemerintah di bidang energi tidak hanya bergantung pada fosil dan batu bara. Tapi harus berinovasi dan beralih ke energi yang berkelanjutan. Ketergantungan pada harga minyak tidak akan menjamin menuju perekonomian yang stabil. Perhatian parlemen pada persoalan energi semata-mata untuk mendukung program-program pemerintah. Politisi Partai Demokrat itu menyampaikan, untuk mewujudkan kebijakan energi yang terbarukan eksekutif dan legislatif harus bekerjasama. DPR RI menyadari kerja sama antara eksekutif dan legislatif dalam kebijakan yang mengarah pada energi terbarukan sangat diperlukan. Oleh sebab itu, dalam forum ini turut mengundang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).	WPFSD 2018 Focuses on Renewable Energy The 2nd World Parliamentary Forum on Sustainable Development (WPFSD) will mainly focus on renewable energy, said Nurhayati Ali Assegaf, Chairperson of the Committee for Inter-Parliamentary Cooperation (BKSAP). The <u>international</u> forum held in Bali on 12-13 September 2018 will be attended by parliamentary representatives from 45 countries. "Emerging countries, such as Indonesia, are struggling with fuel prices. Global economy also relays on the fuel price. We will be talking about sustainable energy," Nurhayati said during the dinner reception on 11 September 2018. According to her, more parliaments in the world are now trying to urge the governments to <u>make-formulate</u> energy policies in such a way that people no longer depend on the fossil and coal fuels. There should be an innovation and a shift to sustainable energy. A stable economy would not depend on the fuel price. Parliaments' concern over energy issues is basically to <u>bolster support</u> government's programs. The Democrat Party politician said the government and parliament are supposed to work together to <u>make-develop</u> a renewable- energy policy. The Indonesian House said the collaboration of the government and parliament to <u>make-implement</u> a renewable energy policy is indispensable. Therefore, this forum also invites Minister of Energy and Mineral Resources (ESDM) <u>Ignatius</u> <u>Ignasius</u> Jonan, and Minister of National Development Planning Agency (Bappenas) Bambang Brodjonegoro. "Minister of ESDM Ignasius Jonan and Minister of Bappenas will also attend this forum. So, this is <u>eventually</u>
--	---

Comment [U29]: Cari aja 'collocation of
policy', jadi bisa pake verb yg sesuai mutt

"Menteri ESDM Ignasius Jonan akan hadir, Kepala Bappenas juga hadir. Jadi ini memang sebetulnya, diplomasi parlemen diperuntukkan untuk kebijakan-kebijakan luar negeri pemerintah, yang berdampak pada kemaslahatan dalam negeri," jelas Nurhayati. (eko/sf)	<u>practically</u> a parliamentary diplomacy forum to support government's foreign policies which are beneficial to the nation," Nurhayati said. (eko/sf/mut) EDITED BY MBAK ICHA
--	--

WPFSD Usung Tema Peran Perempuan dalam EBT 12-09-2018 / B.K.S.A.P. Peran perempuan dalam penggunaan energi atau "Woman Participation and Sustainable Energy" menjadi salah satu tema yang diusung dalam acara The 2nd World Parliamentary Forum on Sustainable Development (WPFSD). Sementara untuk tema utama Forum Parlemen Dunia ini bertema "Partnership Towards Sustainable Energies for All" atau "Kemitraan Menuju Energi Berkelanjutan untuk Semua". "Salah satu tema kita dalam Forum Parlemen Dunia ke-2 ini adalah sustainable energies for all. Sebagaimana kondisi yang saat ini kita rasakan, penggunaan energi fosil sudah sangat memprihatinkan bagi kita. Oleh karenanya, DPR RI berinisiatif untuk mengangkat tema sustainable energies for all," ujar Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf di Bali, Rabu (12/9/2018). Nurhayati mengatakan, adapun salah satu alasan pemilihan tema peran perempuan dalam penggunaan energi pada forum tersebut disebabkan kecenderungan lebih yang dominannya perempuan dalam menggunakan energi di dalam kehidupan rumah tangga. Selain itu, menurutnya, inovasi untuk memperbaharui barang-barang bekas juga lebih banyak dilakukan oleh perempuan. "Kita berharap dengan adanya tema women participations tersebut, kita bisa mengajak semua masyarakat dunia untuk menyadari bahwa peran perempuan didalam energi baru terbarukan ini sangatlah penting," papar politisi Fraksi Demokrat tersebut. Nurhayati juga menjelaskan bahwa acara Forum Parlemen Dunia ke-2 itu diselenggarakan dengan mengundang serta menampilkan peran dari pemerintah. Pihaknya ingin menunjukkan	WPFSD Promotes Women's Role in Renewable Energy 12-09-2018 / B.K.S.A.P. The role of women in energy consumption became one of the themes at the 2nd World Parliamentary Forum on Sustainable Development (WPFSD). Meanwhile, the main theme of the meeting was "Partnership Towards Sustainable Energies for All". "One of the themes at The 2nd World Parliamentary Forum is sustainable energies for all. As we all know, the use of fossil energy is alarming. The Indonesian House of Representatives, therefore, initiates the theme of sustainable energies for all," said Nurhayati Ali Assegaf, Chairperson of Committee for Inter-Parliamentary Cooperation (BKSAP) on 12 September 2018 in Bali. She said one of the reasons why the Committee chose the theme of women participation in energy was because of their dominant roles in household energy consumption. In addition, there are more women willing to innovate by recycling discarded items. "We hope, through the theme of women participations, we can persuade people all over the world to acknowledge that women's participation in renewable energy is very important," said the Democrat Party Faction politician. Nurhayati said the forum also invites Indonesian government representatives to present their programs and roles. The Indonesian House wants to show that the government will not be able to realize the sustainable development goals on their own, neither will the legislature.
--	--

Comment [AL30]: The 'innovation' part is missing from the translation here.

Comment [AL31]: To do something solely means only doing that particular action, not doing it on their own/without the help of others.

bahwa dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan tidak bisa pemerintah berjalan sendiri, dan DPR RI juga berjalan sendiri. "Sinergitas dan koordinasi sangat diperlukan. Kita berharap dengan pencapaian ini selain ada international road map, tetapi diikuti juga dengan legislasi dari DPR RI. Dan kemudian bisa disiapkan budget atau anggaran guna mencapai roadmap itu," tutur politisi dapil Jawa Timur itu. Oleh karenanya, Indonesia patut berbangga, sambung Nurhayati, karena acara Forum Parlemen Dunia ke-2 itu merupakan implementasi dari diplomasi parlemen, khususnya di dalam mendukung kebijakan politik luar negeri pemerintah Indonesia, lebih khusus lagi di dalam bidang energi baru dan terbarukan. (dep/sf)	"We do need synergy and coordination. We hope this achievement will result not only in an international roadmap, but also a legislation enacted by the House. Afterwards, we can provide the budget for the roadmap," said the lawmaker from East Java constituency. Therefore, Indonesia is proud to host the 2nd World Parliamentary Forum because it is the implementation of parliamentary diplomacy, especially in supporting the government's foreign policy, and more specifically the renewable and sustainable energy issues. (dep/sf/mut) EDITED BY MAS AJI	Comment [AL32]: Sounds awkward. Better translate it as 'the government's foreign policy'.
---	---	---

Ketua DPR Dorong Reformasi di Tubuh PBB

16-09-2018 / B.K.S.A.P.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mendorong kembali proses reformasi di dalam tubuh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), khususnya Dewan Keamanan PBB. Tujuannya, agar PBB bisa berperan lebih baik dalam memelihara keamanan dan perdamaian dunia.

Demikian mengemuka dalam pertemuan ke-4 Parlemen MIKTA pada sesi ke-2 yang membahas tentang menjaga perdamaian dan keamanan dunia melalui penguatan fungsi PBB yang diselenggarakan di Istana Tampak Siring, Bali, Minggu (16/09).

Bamsoet menilai upaya PBB dalam memelihara stabilitas keamanan dan perdamaian dunia, belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat internasional. Khususnya, ketika upaya PBB menciptakan keamanan dan perdamaian dunia terbentur pada kepentingan negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB.

"Misalnya, dalam menyikapi konflik Palestina-Israel, Dewan Keamanan PBB seakan tidak berdaya menghadapi Amerika Serikat. Amerika Serikat sebagai salah satu anggota tetap Dewan Keamanan PBB, beberapa kali menggunakan hak vetonya untuk menentang draf resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengutuk penggunaan kekerasan oleh Israel terhadap warga sipil Palestina," ujar Bamsoet.

Melihat situasi tersebut, Bamsoet mengkritisi dengan mendorong kembali proses reformasi di dalam tubuh PBB, khususnya Dewan Keamanan PBB agar badan dunia ini bisa berperan lebih baik untuk mewujudkan harapan masyarakat internasional.

"Fokus reformasi Dewan Keamanan

Indonesian Speaker Urges UN Reform

16-09-2018 / B.K.S.A.P.

House of Representatives Speaker, Bambang Soesatyo, urged reform in the United Nations, particularly the UN Security Council (UNSC), to reform, saying the world body should play a more effective role in security and peace across the globe. ➡

Bambang Soesatyo, known by his acronym Bamsoet, made that statement at the second plenary of The 4th MIKTA Speakers' Consultation, discussing peace and security mainthrough empowering-strengthening the UN function, at the Istana Tampak Siring, Bali, on 16 September 2018.

Bamsoet said that the UN's bid to maintain international peace and security had not completely met the expectation of the people's-international communityexpectation, especially when the 193-nation organization's attempted to maintain peace and security did not go with the interests of the permanent members of the UNSC.

"For example, in response dse to Palestine-Israel conflict, the UNSC failed to deal with the United States. As one of the permanent members of the UNSC, the US has used the veto for several times to prevent a draft resolution condemning Israel's use of force against Palestinian civilians," Bamsoet said.

Bamsoet criticized the situation and called for UN, especially the UNSC, reform, urging the world body to play a bigger role in fulfilling people's-the expectation of international community.

Formatted: Font: 11 pt, English (U.S.)

PBB harus ditujukan pada upaya untuk menjadikan Dewan Keamanan lebih demokratis dan representatif. Untuk kategori keanggotaan, misalnya, kami mendorong agar keanggotaan Dewan Keamanan memperhatikan keterwakilan antar-kawasan dan antara negara maju dengan negara berkembang, serta konstituen utama dunia dalam proposal peningkatan keanggotaan Dewan Keamanan PBB," katanya. Terkait hak veto, Bamsoet berpendapat, tidak mudah menghapus hak veto yang dimiliki lima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Namun, keberadaan hak veto tersebut perlu dikaji ulang. "Bagi Indonesia, hak veto sangat tidak demokratis dan tidak mewakili suara anggota PBB. Apalagi hak veto selalu dimanfaatkan untuk kepentingan negara pemegang hak veto. Karenanya, ada baiknya hak veto tersebut dikaji ulang," tegas Bamsoet. Lebih lanjut, ia menjelaskan, sejalan dengan terpilihnya Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019-2020, DPR RI mendukung empat prioritas yang akan dijalankan pemerintah Indonesia di Dewan Keamanan PBB. Prioritas pertama adalah melanjutkan kontribusi untuk mewujudkan perdamaian dunia. Upaya tersebut akan dilakukan Indonesia dengan memperkuat ekosistem perdamaian dan stabilitas global, dengan mendorong kebiasaan berdialog dan penyelesaian konflik secara damai. "Prioritas kedua, membangun sinergisitas antara organisasi-organisasi regional dan PBB untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan. Prioritas ketiga, meningkatkan kerja sama dalam memerangi terorisme, ekstremisme dan radikalisme. Dan, prioritas keempat adalah mensinergikan upaya penciptaan perdamaian dengan upaya pembangunan berkelanjutan," urai Bamsoet.	"The UNSC reforms should focus on building a more democratic and representative UNSC. Regarding membership in the UNSC, for example, we are urging the body to pay attention to inter-regional and among developed and developing country representativeness, and world main constituency in the proposal for representativeness improvement of the UNSC," he said. In terms of the veto right, the Speaker said that it is was not easy to revoke the veto power of the five permanent members of the UNSC (China, France, Russia, the United Kingdom, and the United States). Even so, the existence of the veto right might needed to be reviewed. "Indonesia sees the veto right as an undemocratic practice and it does not represent the voices of the UN members. So, it would be appropriate to review the veto right," Bamsoet said. Further he A<u>explained, as</u> Indonesia was <u>was</u> elected as a non-permanent member of the UNSC for the 2019-2020 period, Indonesian House supported<u>eds</u> four priorities it will would exercise take during its term at the UNSC. <u>"The main priority would be the continuation of Indonesia's contribution to maintain<u>ing</u> peace across the globe by strengthening peace ecosystem and global stability through promoting dialouge and resolving conflicts peacefully."</u> "The second priority would be establishing synergy among the regional organizations and the UN to maintain regional peace and stability. And the third would be stepping up<u>promoting</u> cooperation to combat terrorism, extremism, and radicalism. The fourth is synergizing efforts to build peace through sustainable development," Bamsoet said.
---	---

Bamsoet berharap keempat prioritas tersebut dapat terlaksana dengan baik saat Indonesia menjalankan tugas sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Mengingat, keempat prioritas Indonesia tersebut akan berkontribusi pada pemberdayaan PBB dalam memelihara keamanan internasional dan perdamaian dunia. "Kami juga mengajak parlemen negara-negara MIKTA untuk turut mengawal dan memastikan bahwa pemerintah kita berperan dan berkontribusi dalam memelihara keamanan dan perdamaian dunia. Mari bersama kita wujudkan dunia yang aman dan damai bagi seluruh masyarakat dunia," pungkask Bamsoet. MIKTA merupakan forum kemitraan antara Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki dan Australia. MIKTA dibentuk pada tahun 2013, bertujuan untuk mendukung pemerintah global yang efektif. Saat ini Indonesia menjadi ketua MIKTA. Dalam pertemuan ini dari Indonesia hadir Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, Ketua BKSAP DPR Nurhayati Ali Assegaf, Wakil Ketua BKSAP Fadel Muhammad dan Hazrul Azwar, serta Dirjen Kerjasama Multilateral Kemenlu RI Febrian Ruddyard. Dari Korea Selatan hadir Ketua Parlemen Korea Selatan Moon Hee Sang, anggota parlemen Korea Selatan Lee Soo Hyuck dan Ji Sang Wuk. Australia diwakili Wakil Presiden Senat Australia Sue Lines dan dari Meksiko hadir Dubes Meksiko untuk Indonesia Armando Gonzalo Alvarez. (Tim)	Bamsoet hoped that the four priorities <u>will</u> <u>would</u> be well implemented when Indonesia <u>exercises</u><u>carried out</u> its functions as a non-permanent member of the UNSC, given that they <u>will-would</u> contribute to the UN empowerment in maintaining international peace and security. "We would like to invite all MIKTA parliaments to <u>make-sure</u><u>ensure</u> that <u>each-of</u> our government<u>ss</u> participate and contribute <u>in-to</u> maintaining security and peace across the globe. Let <u>u-s</u> create a safe and peaceful world to all human beings," Bamsoet said. The MIKTA is a partnership forum <u>among</u> <u>that brings together</u> Mexico, Indonesia, South Korea, Turkey and Australia. Established in 2013, MIKTA aims to promote an effective global governance. Indonesia is now <u>holding</u> the chair of the MIKTA. Among the Indonesian high-profile figures attending the meeting were Vice Speaker Fahri Hamzah, Vice Chair<u>person</u> of BKSAP Fadel Muhammad and Hazrul Azwar, Director General for Multilateral Affairs of the Ministry of Foreign Affairs Febrian Alphyanto Ruddyard. Also attending the meeting <u>were</u> Moon Hee-sang, <u>Speaker of the National Assembly of the Republic of Korea</u>, Lee Soo-hyuck and Ji Sang-wuk, <u>Speaker and MPs of the National Assembly of the Republic of Korea</u>; <u>Deputy President of the Australian Senate Sue Lines</u>, and Mexico's Ambassador to Indonesia, Armando Gonzalo Álvarez Reina. (Tim/mut) EDITED BY PAK BUDIMAN
--	--

DPR Promosikan Industri Kreatif ke Dunia Internasional 16-09-2018 / B.K.S.A.P. Wakil Ketua BKSAP DPR Fadel Muhammad memanfaatkan momentum Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan Parlemen anggota MIKTA ke 4 untuk mempromosikan produksi industri kreatif Indonesia ke dunia internasional. Sehingga forum ini menjadi bermanfaat menjadi ajang promosi karya anak bangsa guna menjalin kerja sama dengan negara lain. "Secara spesifik bicara soal ekonomi kreatif, dimana ekonomi kreatif kita tumbuh hebat dan kita perlu masuk pasar di Korea, Turki, Meksiko dan Australia. Kami mendorong itu," tutur Fadel usai melakukan pertemuan MIKTA di Istana Kepresidenan Tampak Siring, Bali, Minggu, (16/09). Politisi Golkar ini juga menjelaskan bahwa pertemuan MIKTA ini sangat besar manfaatnya bagi keberlangsungan Indonesia ke depan. Terutama untuk memperlancar ekspor barang produksi Indonesia ke beberapa negara. "MIKTA sangat besar manfaatnya untuk Indonesia. Kita bicara banyak hal dengan Meksiko, Korea, Turki dan Australia. Kita bicarakan topik yang dibutuhkan bangsa kita untuk sama-sama dengan mereka untuk jaga pertumbuhan kita ke depan," jelas Fadel. Industri kreatif menjadi salah satu poin yang dibicarakan dalam sidang MIKTA ini. Hal ini menjadi peluang Indonesia dalam merekatkan kerja sama yang saat ini tengah terjalin baik. Untuk lebih mengembangkan industri kreatif, Indonesia selaku Koordinator MIKTA tahun 2018 mengusung tema 'Fostering Creative Economy and Contributing to Global Peace' di berbagai pertemuan dan kerja sama MIKTA. Sejalan dengan tema tersebut, Indonesia telah menyelenggarakan 'MIKTA Experts' Meeting on Inclusive Digital Economy Hub' dan 'MIKTA Start-Up Fest'. (Tim)	Indonesian House Promotes Creative Industry 16-09-2018 / B.K.S.A.P. Indonesia should use the momentum of hosting the 4th MIKTA Speakers' Consultation as an opportunity to promote Indonesia's creative industry products to the global market, so that it could encourage partnership between Indonesian creative workers and the local craftsmans could seek beneficial cooperation with other countries' businesspeople, said Vice Chairperson of Committee for Inter-Parliamentary Cooperation (BKSAP), Fadel Muhammad. "Regarding creative economy which is now accelerating, we need to penetrate Korea, Turkey, Mexico, and Australia markets. We endorse that are pushing them to do so," Fadel said after a MIKTA meeting at the Istana-Tampak Siring Presidential Palace, Bali, on Sunday (16/9) September 2018. The Golkar Party politician said that the MIKTA was significantly beneficial for the Indonesian sustainability in the future, especially in easing exporting products to several countries. "The MIKTA is very beneficial for Indonesia. We have talked a lot about various issues with Mexico, Korea, Turkey, and Australia. We talked about topics this nation needs to maintain development," Fadel said. Creative industry becomes one of the key issues at the current MIKTA meeting. This is an opportunity for Indonesia to deepen cooperation which is now running smoothly. To develop creative industry, Indonesia, as the coordinator of the 2018 MIKTA, will focus on the theme of raises a topic of 'Fostering Creative Economy and Contributing to Global Peace' as a theme in every MIKTA meetings and cooperation. Under the same theme, Indonesia had already held 'MIKTA Experts' Meeting on Inclusive Digital Economy Hub' and 'MIKTA Start-Up Fest'. (Tim/mut) DIEDIT OLEH MAS NOVRI
---	---

Bukti Pengendalian Pembelajaran Aktualisasi oleh Mentor

Nama Peserta	:	Nurul Muttaqin, S.S.
NIP	:	198608062018021001
Unit Kerja	:	Bagian Administrasi Kegiatan Luar Negeri Anggota
Jabatan	:	Calon Penerjemah Ahli Pertama
Isu	:	Masih kurangnya berita-berita berbahasa Inggris di situs dpr.go.id tentang kegiatan Anggota Dewan saat menerima delegasi dari negara lain.

- 3) Kegiatan 3: Pendistribusian berita-berita yang akan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan	Aktivitas telah dilaksanakan sesuai perencanaan	
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	Berita sudah edit dalam bentuk soft copy	
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Sangat relevan karena penerjemah memerlukan sumber berita	
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	Memperluas daya cakup informasi karena juga akan dinikmati orang lain	
Penguatan Nilai Organisasi	Peningkatan nilai-nilai profesionalisme	

Bukti Pengendalian Pembelajaran Aktualisasi oleh Coach

Nama Peserta	:	Nurul Muttaqin, S.S.
NIP	:	198608062018021001
Unit Kerja	:	Bagian Administrasi Kegiatan Luar Negeri Anggota
Jabatan	:	Calon Penerjemah Pertama
Isu	:	Masih kurangnya berita-berita berbahasa Inggris di situs dpr.go.id tentang kegiatan Anggota Dewan saat menerima delegasi dari negara lain.

- 3) Kegiatan 3: Pendistribusian berita-berita yang akan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Coaching	Waktu dan Media Coaching
Tahapan Kegiatan	Tahapan pendistribusian berita akan diterjemahkan dikordinasikan OK	27/7/18 Penerbitan media
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	Hasil berita/file berita yg sudah diterjemahkan senior	media
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Akuntabilitas - K.M.	media
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	Mengulangi Tusi bagian Administrasi Kegiatan Luar Negeri Anggota	media
Penguatan Nilai Organisasi	Profesional & Integritas Dominan pada tahapannya	media

KEGIATAN KE-4



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

3 September 2018

Nomor : DP/4838/SETJEN DAN BK-DPRRI/AP.04/09/2018
Sifat : Penting
Derajat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Undangan**

Yth.

**Kepala Bagian Media Cetak dan Media Sosial
Biro Pemberitaan Parlemen Setjen dan BK DPR RI
Jakarta**

Dengan hormat kami beritahukan, bahwa dalam rangka Habitiasi Pelatihan Dasar CPNS Golongan III di lingkungan Biro Kerja Sama Antar Parlemen Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, di mana kegiatan habituasi tersebut menerjemahkan berita terkait kegiatan BKSAP di website www.dpr.go.id, sehubungan dengan itu kami mengundang Kepala Bagian Media Cetak dan Media Sosial atau jajarannya pada:

Hari, tanggal : Kamis, 6 September 2018
Waktu : Pukul 10.00 - Selesai
Tempat : Ruang Rapat ALPA
Gd. Nusantara III DPR RI Lt. 6
Acara : Konsultasi mengenai teknis penulisan dan prosedur
penerjemahan berita terkait kegiatan BKSAP pada website
www.dpr.go.id.

Atas perhatian dan kehadiran saudara kami mengucapkan terima kasih

Kabag Set. Administrasi
Kegiatan Luar Negeri Anggota

Sartomo, S.S., M.Si
NIP. 196808111996031001

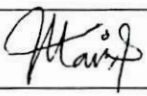
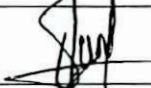
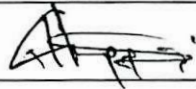


**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

DAFTAR HADIR

Tahun Sidang : 2018 - 2019
Masa Persidangan : I
Rapat Ke : --
Jenis Rapat : Rapat Koordinasi
Sifat Rapat : Tertutup
Hari, tanggal : Kamis, 6 September 2018
Waktu : Pukul 10.00 WIB. - selesai
Tempat : Ruang Rapat BKSAP
Gedung Nusantara III Lt. 4
Ketua Rapat : Sartomo, S.S., MSi
A c a r a : 1. Konsultasi dengan Bagian Media Cetak dan Media Sosial tentang teknis penerjemahan berita terkait kegiatan BKSAP dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris ke dalam website www.dpr.go.id;
2. Lain-lain.

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Endah T.D Retnoastuti NIP. 196804021993022001	Kepala Biro KSAP	
2.	Sartomo, S.S., M.Si NIP. 196808111996031001	Kabag Set. Adm. Kegiatan Luar Negeri Anggota	
3.	Elvira Dianti A., S.S., M.Si. NIP. 196911271997032005	Kasubag Alih Bahasa	
4.	Nita Juwita, S.Sos NIP. 198110182005022001	Kasubag Media Sosial dan Website	
5.	Umiati, S.Sos. NIP. 197505051998032008	Analisis Kerja Sama Luar Negeri Subbag Penyiapan Adm	
6.	Andriani Sofiati NIP. 197010081992032003	Penyiap Bahan Persidangan	
7.	Rusli Muhammad Jein NIP. 197807272002121005	Pengadministrasi Persidangan	
8.	Fasrudin Arief Budiman, S.S, M.Si NIP. 197011051997031007	Penerjemah Madya	
9.	Novri Helmawan, S.Pd NIP. 197711132009121002	Penerjemah Muda	
10.	Andriaji Gumilar Laksanaputra, S.S. NIP. 198408012009121003	Penerjemah Pertama	

11.	Martrisa Canda Chaniago, S.Pd. NIP. 198403312009122001	Penerjemah Muda	
12.	Abdul Muiz, S.Pd. NIP. 198602122018011001	Penerjemah Pertama	
13.	Nurul Muttaqin, S.S. NIP. 198608062018021001	Penerjemah Pertama	
14.	Yudi Chandri Setiawan NIP. 199112232018031001	Penerjemah Pertama	
15.	SINGGIH K. R	MENSO & WEBSITE	
16.	Sofyan Efendi	MediaKosmi	
17.			



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

LAPORAN SINGKAT KEGIATAN 4 BERKOORDINASI DENGAN BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN

Nama Kegiatan	: Rapat Koordinasi Bagian Administrasi Kegiatan Luar Negeri Anggota (Minluna) dengan Bagian Media Cetak dan Media Sosial tentang teknis penerjemahan berita terkait kegiatan BKSAP dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris ke dalam website www.dpr.go.id
Hari/Tanggal	: Kamis, 6 September 2018
Waktu	: Pukul 10.00 – 11.15 WIB
Tempat	: Ruang Rapat BKSAP Gedung Nusantara 3 Lt. 4
Peserta	1. Ibu Elvira Dianti A., SS, M.Si (Kasubbag Alih Bahasa) 2. Fasrudin Arief Budiman, S.S., M.Si. (Penerjemah Ahli Madya) 3. Novri Helmawan, S.Pd. (Penerjemah Ahli Muda) 4. Andriaji Gumilar Laksanaputra, S.S. (Penerjemah Ahli Pertama) 5. Martrisa Canda Chaniago, S.Pd. (Penerjemah Ahli Muda) 6. Abdul Muiz, S.Pd. (Penerjemah Ahli Pertama) 7. Nurul Muttaqin, S.S. (Penerjemah Ahli Pertama) 8. Yudi Chandri Setiawan, S.Pd. (Penerjemah Ahli Pertama) 9. Para Staf Minluna 10. Singgih Kinanti Rimbani (Bagian Media Cetak dan Media Sosial) 11. Sofyan Efendi (Bagian Media Cetak dan Media Sosial)

Ringkasan Hasil Pertemuan

1. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Ibu Elvira Dianti A., SS, M.Si selaku Kasubbag Alih Bahasa Minluna pada pukul 10.00 di Ruang Rapat BKSAP, Gedung Nusantara 3 Lt. 4. Tempat rapat pindah dari rencana semula yaitu di Ruang Rapat AIPA dikarenakan ruangan tersebut tengah dipakai rapat oleh bagian lain. Biro Pemberitaan Parlemen diwakili oleh Singgih Kinanti Rimbani dan Sofyan Efendi dari Bagian Media Cetak dan Media Sosial.
2. Rapat ini digelar dalam rangka membahas sejumlah teknis penulisan berita hasil terjemahan, seperti penulisan nama penerjemah di belakang nama penulis berita sumber (bahasa Indonesia).
3. Singgih Kinanti Rimbani mengatakan penulisan inisial penerjemah dalam berita terjemahan diserahkan sepenuhnya kepada Minluna. Inisial tersebut sebaiknya ditulis di belakang penulis berita dengan dipisahkan menggunakan tanda "/". Dari internal Minluna disepakati bahwa inisial untuk Nurul Muttaqin adalah "mut", Abdul Muiz "uiz", dan Yudi Chandri Setiawan "chan".
4. Sofyan Efendi menyampaikan Bagian Media Cetak dan Media Sosial mendukung kegiatan penerjemahan berita ini. Jika memungkinkan, penerjemahan dilakukan tidak hanya untuk berita-berita terkait kegiatan BKSAP, melainkan juga berita-berita terkait kegiatan pimpinan DPR RI ketika menerima kunjungan pejabat dari negara lain.

5. Mengenai hal ini, Ibu Elvira mengatakan pihaknya akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan atasan di Minluna dan Biro KSAP.
6. Sementara itu, Sofyan Efendi mengatakan Bagian Media Cetak dan Media Sosial ingin berkerja sama dengan para penerjemah untuk memproduksi konten-konten berbahasa Inggris untuk diunggah di akun media sosial DPR, terutama terkait kegiatan internasional, misalnya, yang terdekat adalah The 2nd World Parliamentary Forum on Sustainable Development, 12-13 September 2018, di The Patra Bali Hotel. Bentuknya antara lain berupa penerjemahan kutipan pendek narasumber untuk diunggah di akun media sosial DPR RI.
7. Penerjemah Muda Novri Helmawan meminta Bagian Media Cetak dan Media Sosial mencari tahu berapa jumlah kunjungan berita (*hits*), dan dari negara mana, pada setiap berita yang diunggah di website. Hal ini penting untuk mengetahui keterjangkauan berita dan seberapa besar tingkat keterbacaan berita oleh pembaca negara lain, khususnya oleh para tamu/delegasi yang pernah melakukan kunjungan ke DPR RI. Kerap kali, imbuh Penerjemah Ahli Madya Fasrudin Arief Budiman, delegasi menanyakan hasil pertemuan dengan pimpinan DPR RI, dan hal itu salah satunya bisa dipenuhi melalui berita di website.
8. Lain-lain.

Mengetahui,

Mentor



Fasrudin Arief Budiman, S.S., M.Si.
NIP. 197011051997031007

Yang membuat,



Nurul Muttakin, S.S.
198608062018021001

Dokumentasi Kegiatan



Rapat Koordinasi dengan Biro Pemberitaan Parlemen dihadiri oleh pimpinan Minluna, para penerjemah, dan staf dari Bagian Media Cetak dan Media Sosial.

Bukti Pengendalian Pembelajaran Aktualisasi oleh Mentor

Nama Peserta	:	Nurul Muttaqin, S.S.
NIP	:	198608062018021001
Unit Kerja	:	Bagian Administrasi Kegiatan Luar Negeri Anggota
Jabatan	:	Calon Penerjemah Ahli Pertama
Isu	:	Masih kurangnya berita-berita berbahasa Inggris di situs dpr.go.id tentang kegiatan Anggota Dewan saat menerima delegasi dari negara lain.

4) Kegiatan 4: Berkoordinasi dengan Biro Pemberitaan Parlemen

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan	Kelanjutan dari kegiatan Pendistribusian berita yang akan diterjemahkan	
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	Hasil Catatan rapat dengan Biro Pemberitaan Parlemen	
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Sangat relevan karena akan berkoordinasi dengan sumber pembuat berita	
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	Mengaitkan koordinasi dengan Biro Pemberitaan & penerjemahan	
Penguatan Nilai Organisasi	Penguatan nilai-nilai Profesionalisme	

Bukti Pengendalian Pembelajaran Aktualisasi oleh Coach

Nama Peserta	:	Nurul Muttaqin, S.S.
NIP	:	198608062018021001
Unit Kerja	:	Bagian Administrasi Kegiatan Luar Negeri Anggota
Jabatan	:	Calon Penerjemah Pertama
Isu	:	Masih kurangnya berita-berita berbahasa Inggris di situs dpr.go.id tentang kegiatan Anggota Dewan saat menerima delegasi dari negara lain.

4) Kegiatan 4: Berkoordinasi dengan Biro Pemberitaan Parlemen

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Coaching	Waktu dan Media Coaching
Tahapan Kegiatan	<i>tahapan koordinasi dgn Biro Pemberitaan Parlemen dilakukan</i>	<i>23/8/10 Presip medi</i>
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	<i>Laporan hasil koordinasi</i>	<i>medi</i>
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	<i>WOB & akuntabilitas</i>	<i>medi</i>
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	<i>Kegiatan ini mendukung Tusi organisasi</i>	<i>medi</i>
Penguatan Nilai Organisasi	<i>Akuntabel & Integritas</i>	<i>medi</i>

KEGIATAN KE-5

potong —

Disusun

Sebagai salah satu
syarat lulus
mengikuti Latihan
CPNS



NEWS WRITING MANUAL

FOR THE WEB
2018

Manual Prepared as
one of the Key Requirements
for the Basic Training of
Civil Servant Candidate

potong —

lipat

Nurul Multaqin, SS



→ Guide to Writing
News Article

NEWS WRITING MANUAL

Manual submitted in
partial fulfillment of
the requirements for
the Basic Training of
Civil Servant
Candidate

~~FOR THE WEB~~
~~2018~~

Secretariat of MP's Administration of Foreign Official Visit
Secretariat General of the Indonesian House of Representatives

— potong

— potong

lipat

PREFACE

This guide is ~~prepared-intended~~ to provide a simple guidance for news writing and editing. The content of the book is compiled from various resources, such as books ~~and~~ websites. The wording of the ~~manual-guide~~ is entirely similar to the resources, though ~~a little~~ ~~minor~~ modification was made. This guide is the result of a process that comes from the Basic Training of Civil Servant Candidate of the Secretariat General of the Indonesian House of Representatives I am participating ~~in~~.

It brings together materials ranging from the headline conventions to punctuation with examples of each discussion and brief explanation. It is organized so that readers can easily locate chapters that pertain to their particular interests. This guide also deals with how the traditional print and the new online newspapers enhance the interpersonal dimension of communication by relating to readers through certain conventional linguistic means, most notably the shift of grammatical tenses.

In addition, this book is also motivated by the desire ~~that~~ we, interpreters ~~and~~ ~~translators~~ assigned at the Secretariat of MP's Administration of Foreign Official Visit of the Secretariat General of the Indonesian House of Representatives, have had to provide news articles in English on www.dpr.go.id.

Formatted: Font: Bookman Old Style

Jakarta, September 2018

Nurul Muttaqin

Bukti Pengendalian Pembelajaran Aktualisasi oleh Mentor

Nama Peserta	:	Nurul Muttaqin, S.S.
NIP	:	198608062018021001
Unit Kerja	:	Bagian Administrasi Kegiatan Luar Negeri Anggota
Jabatan	:	Calon Penerjemah Ahli Pertama
Isu	:	Masih kurangnya berita-berita berbahasa Inggris di situs dpr.go.id tentang kegiatan Anggota Dewan saat menerima delegasi dari negara lain.

- 5) Kegiatan 5: Penyusunan buku pakem penulisan berita dalam bahasa Inggris

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan	Kelanjutan dari kegiatan koordinasi dengan Biro Pemberitaan Parlemen	
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	Buku berjudul Guide to Writing News Article	
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Sangat relevan karena berisi informasi v/ membuat tulisan/berita Parlemen	
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	Sangat penting & berguna karena penulisan berita yg baik spt mjd sumber informasi	
Penguatan Nilai Organisasi	DKR makin dikenal & kegiatan yg dapat diikuti oleh orang asing	

Bukti Pengendalian Pembelajaran Aktualisasi oleh Coach

Nama Peserta	:	Nurul Muttaqin, S.S.
NIP	:	198608062018021001
Unit Kerja	:	Bagian Administrasi Kegiatan Luar Negeri Anggota
Jabatan	:	Calon Penerjemah Pertama
Isu	:	Masih kurangnya berita-berita berbahasa Inggris di situs dpr.go.id tentang kegiatan Anggota Dewan saat menerima delegasi dari negara lain.

- 5) Kegiatan 5: Penyusunan buku pakem penulisan berita dalam bahasa Inggris

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Coaching	Waktu dan Media Coaching
Tahapan Kegiatan	terlap olehis - Penyusunan buku panduan Podu testimoni Ok	27/9/18 Diskusi udhi
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	Buku Panduan	udhi
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	K.M. Erika Publik	udhi
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	Pemecahan tugas & target Membantu Visi & Misi org	udhi
Penguatan Nilai Organisasi	Profesionalisme dan integritas for tahapan ini	udhi